



LAPORAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPIP

—●—
**TRIWULAN I
TAHUN 2026**

Memperkuat Ideologi Pancasila,
Meneguhkan Indonesia Raya



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PEMETAAN SASARAN STRATEGIS	1
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026.....	5
A. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif.....	5
A.1. Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang ditindaklanjuti	6
A.2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif	12
A.3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	18
B. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif.....	28
B.1. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti.....	29
B.2. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan	39
B.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	46
C. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Efektif.....	51
C.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan yang dimanfaatkan	52
C.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Materi yang dimanfaatkan 64	64
C.3. Persentase Rekomendasi Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	71
D. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komprehensif.....	76
D.1. Persentase Tenaga Pengajar Pancasila yang Tersertifikasi.....	77
D.2. Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi.	80
D.3. Persentase Peserta Diklat Berkepribadian Pancasila Dengan Tingkat Baik	85

E. Terwujudnya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif.....	95
E.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	95
E.2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	101
E.3. Persentase rekomendasi hasil pengukuran pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan	105
E.4. Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	111
F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima berbasis Elektronik.....	118
F.1. Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja.....	119
F.2. Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	128
F.3. Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja	150
F.4. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan	154
F.5. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP.....	170
F.6. Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	175
BAB III REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2026	182
BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN	185
BAB V PENUTUP	213

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPPIP	3
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif	5
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya	7
Tabel 2. 3 Tahapan Penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	7
Tabel 2. 4 Aktivitas Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya	9
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa	12
Tabel 2. 6 Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	13
Tabel 2. 7 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan	15
Tabel 2. 8 Aktivitas Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa	15
Tabel 2. 9 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila	19
Tabel 2. 10 Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	22
Tabel 2. 11 Relawan Pancasila yang terfasilitasi dan terbina	22
Tabel 2. 12 Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	23
Tabel 2. 13 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif	28
Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila	29
Tabel 2. 15 Rekomendasi Rancangan Produk Hukum yang Diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila	30
Tabel 2. 16 Aktivitas Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila	33
Tabel 2. 17 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	39
Tabel 2. 18 Aktivitas Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	43
Tabel 2. 19 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila	46
Tabel 2. 20 Aktivitas Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila	48
Tabel 2. 21 Indikator Kinerja Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang Efektif	52
Tabel 2. 22 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	53

Tabel 2. 23 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	61
Tabel 2. 24 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	65
Tabel 2. 25 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	70
Tabel 2. 26 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	72
Tabel 2. 27 Aktivitas Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	74
Tabel 2. 28 Indikator Kinerja Program Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komperhensif	77
Tabel 2. 29 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	78
Tabel 2. 30 Aktivitas Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	79
Tabel 2. 31 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	81
Tabel 2. 32 Aktivitas Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	84
Tabel 2. 33 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila	86
Tabel 2. 34 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila	88
Tabel 2. 35 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	92
Tabel 2. 36 Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	93
Tabel 2. 37 Aktivitas Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	93
Tabel 2. 38 Indikator Kinerja Program Terwujudnya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif	95
Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	96
Tabel 2. 40 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengendalian PIP	98
Tabel 2. 41 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	101
Tabel 2. 42 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	103
Tabel 2. 43 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	105
Tabel 2. 44 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan Pancasila	107
Tabel 2. 45 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	112
Tabel 2. 46 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Aktualisasi Pancasila	114
Tabel 2. 47 Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik	118
Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan	

analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja	120
Tabel 2. 49 Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	125
Tabel 2. 50 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	128
Tabel 2. 51 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	133
Tabel 2. 52 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi	143
Tabel 2. 53 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja	150
Tabel 2. 54 Aktivitas Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja	154
Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Kegiatan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan	155
Tabel 2. 56 Pengawasan Kearsipan	162
Tabel 2. 57 Aktivitas Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan	166
Tabel 2. 58 Indikator Kinerja Kegiatan pengawasan internal di lingkungan BPIP ..	170
Tabel 2. 59 Aktivitas Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP	173
Tabel 2. 60 Indikator Keluaran Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	175
Tabel 2. 65 Aktivitas Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	180
Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	183
Tabel 4. 1 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan PIP ..	185
Tabel 4. 2 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	188
Tabel 4. 3 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP	191
Tabel 4. 4 Kendala dan Tindak Lanjut Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	194
Tabel 4. 5 Kendala dan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP	200
Tabel 4. 6 Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen	206



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP.....	2
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total	182
Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program.....	183

DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ARJUNA	: Akreditasi Jurnal Nasional
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BerAKHLAK	: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BIN	: Badan Intelijen Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BTU	: Buku Teks Utama
CPMK	: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKT	: Diskusi Kelompok Terpumpun
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
GNSTA	: Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
IKU	: Indikator Kinerja Utama
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
MKWK	: Mata Kuliah Wajib Kurikulum
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PDN	: Pusat Data Nasional
PDP	: Purnapaskibraka Duta Pancasila
PEMDA	: Pemerintah Daerah



Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PJK	: Pancasila Jurnal Keindonesiaan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	: Prioritas Nasional
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PSP	: Pusat Studi Pancasila
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian <i>Output</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	: Rancangan Undang–Undang
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKN	: Sistem Informasi Kearsipan Nasional
SINTA	: <i>Science and Technology Index</i>
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TP3DN	: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
TTIS/CSIRT	: Tim Tanggap Insiden Siber/ <i>Computer Security Incident Response Team</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bahwa Kepala dan Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan Capaian Program & Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2026 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) terhadap penggunaan anggaran BPIP periode Januari s.d. Maret 2026. Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, mewujudkan Pancasila sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia.

Jakarta, 24 April 2026

KEPALA,

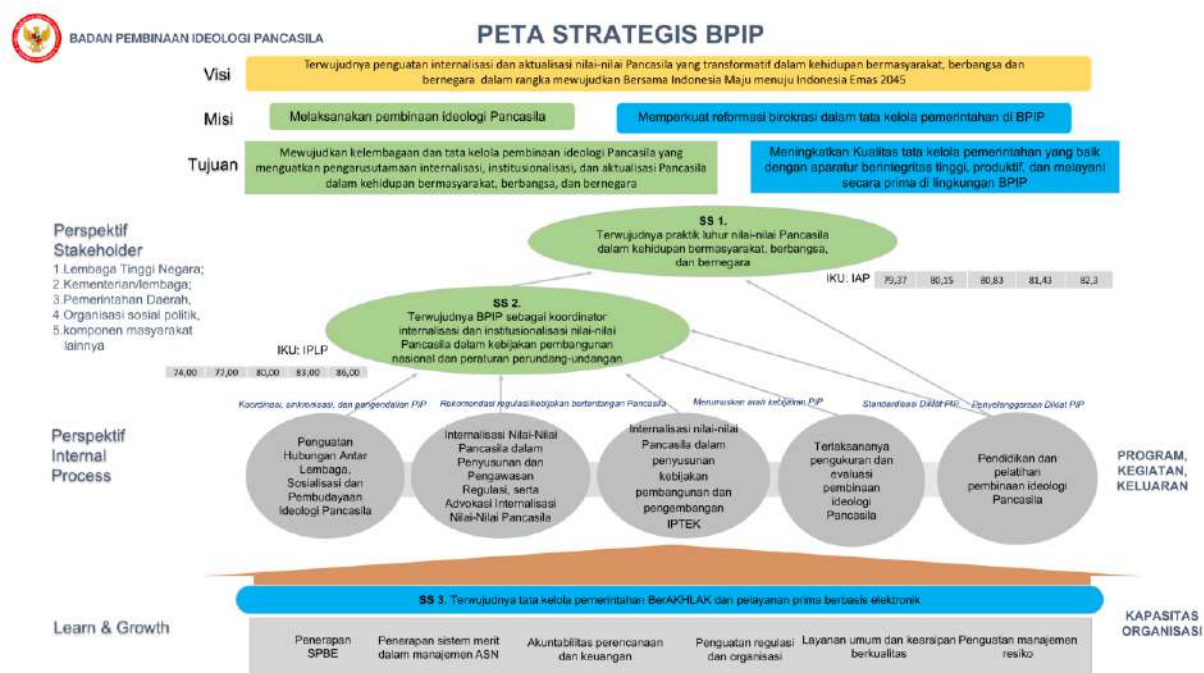
YUDIAN WAHYUDI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis BPIP 2026-2029 adalah:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ketiga sasaran strategis tersebut dapat terwujud dengan dukungan Sasaran Program Kedeputan dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan Sasaran Program PIP dipetakan berikut ini:



PETA STRATEGIS BPIP

Capaian kinerja sasaran program merupakan kinerja pelaksanaan kegiatan yang melekat pada masing-masing sasaran. Pelaksanaan kegiatan periode Triwulan I Tahun 2026 adalah:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila;
 - a. Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti 20%;
 - b. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif dengan capaian 11,41%;
 - c. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif dengan capaian 8,05%.
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti dengan capaian 24%;
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan dengan capaian 30%;
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 20%.
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan dengan capaian 22,5%;
 - b. Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan dengan capaian 16,25%;
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan dengan capaian 28,57%.
4. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - a. Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi dengan capaian 20% ;
 - b. Persentase lembaga penyelenggara diklat Pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi dengan capaian 31,5%;

- c. Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik 20,85%;
5. Terwujudnya pengukuran dan evaluasi Pembinaan ideologi Pancasila;
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 28,7%;
 - b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 18,75%;
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 33%.
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila sila 1 s.d. 5 yang ditindaklanjuti dengan capaian 50%
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.
 - a. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dengan capaian 25%;
 - b. Layanan pengawasan intern di lingkungan BPIP dengan capaian 25%;
 - c. layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja dengan capaian 25%;
 - d. Layanan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan dengan capaian 25%;
 - e. Layanan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi dengan capaian 25%;
 - f. Layanan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 25 %.

Pada Triwulan I Tahun 2026, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2026 realisasi anggaran BPIP adalah 25,67% atau sebesar 73.785.108.694,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2026 sebesar

287.412.742.000,00 Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode Triwulan I Tahun 2026:



PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BPIP



Realisasi Anggaran BPIP

Beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Pada Triwulan I Tahun 2026, antara lain adalah (i) Perlu adanya

penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas; (ii) mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya; (iii) Menyusun Perpres tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila; (iv) Pembangunan sistem manajemen terintegrasi diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (v) Mendorong Rancangan Undang-Undang BPIP.

Pada Triwulan I Tahun 2026 optimalisasi pelaksanaan kegiatan diupayakan sesuai dengan *timeline* kegiatan, bila terdapat kendala teknis dan non teknis yang ada pada pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan perbaikan sesuai rencana aksi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai guna terus membangun penguatan akuntabilitas kinerja, BPIP akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

BAB I

PEMETAAN SASARAN STRATEGIS

Pancasila telah menjadi konsensus para pendiri bangsa sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup yang menaungi tata peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan negara dengan kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan terkonstruksi secara menyebar ke dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila menjadi jiwa dalam tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila selalu menjadi dasar dalam setiap proses pembangunan semenjak Indonesia berdiri. Saat ini sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dalam melaksanakan misi pembangunan Indonesia Emas Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial, dimana kebijakan terkait ideologi Pancasila diarahkan pada:

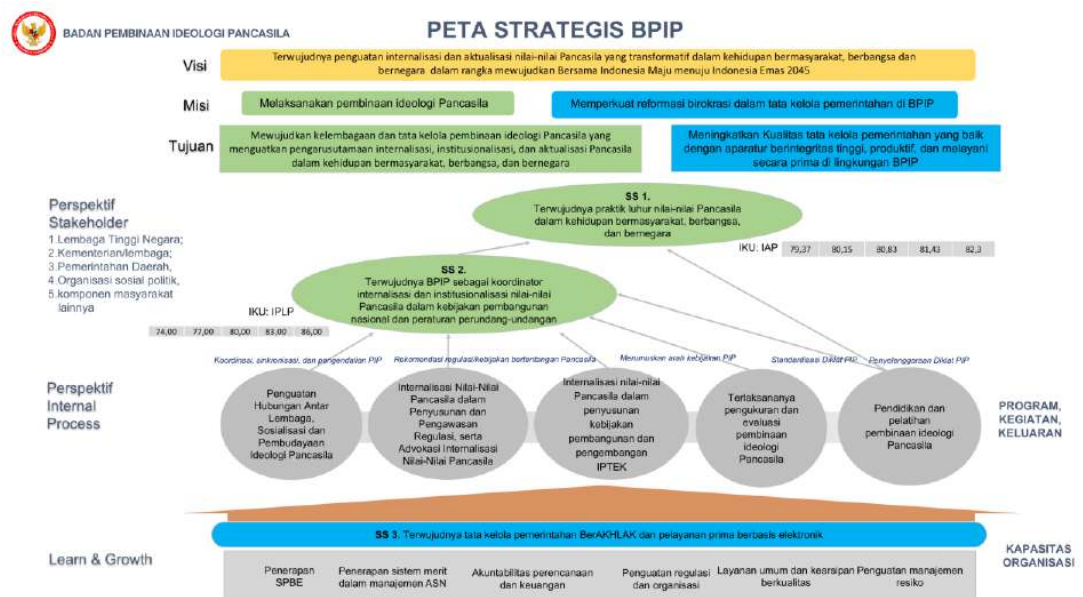
1. Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara;
2. Pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa.

Rencana strategis pelaksanaan Program PIP diarahkan mewujudkan 3 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ketiga sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui dukungan Sasaran Program Kedeputan teknis dan Sekretariat Utama dukungan kapasitas organisasi. Sasaran program yang dicapai dengan berbagai kegiatan. Peta strategis keterkaitan sasaran-sasaran melalui pendekatan perspektif *Stakeholder*, pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan kapasitas organisasi tampak pada Peta Strategis BPIP berikut ini:



Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP

Tujuan sasaran-sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dipetakan di atas, yaitu:

1. Terciptanya kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP;

Ukuran keberhasilan sasaran strategis BPIP adalah, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila	80,15
	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan	Indeks Pelembagaan Pancasila	77
Kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	79
		Kategori SAKIP	B
		Nilai Sistem Merit	335
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
		Indeks SPBE	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88

Kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Program PIP dan Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif;
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif;
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif;
4. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang komperhensif;
5. Terwujudnya pengukuran dan evaluasi Pembinaan ideologi Pancasila yang efektif;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

A. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif

Sebagai Lembaga yang diberi mandat dalam PIP maka fungsi koordinasi dan sinkronisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	REALISASI 2026	KET
Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang ditindaklanjuti	100%	20%	 20%
Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	100%	11,41%	 11,41%
Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	100%	8,05%	 8,05%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

A.1. Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan Program:

Target Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang ditindaklanjuti pada Tahun 2026 adalah 100%.

Jika dilihat perkembangannya selama Triwulan I Tahun 2026 Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan mendukung dan menjadi salah satu Koordinator dalam memfasilitasi dan menghubungkan kegiatan-kegiatan yang berdampak dalam rangka implementasi Peta Jalan pembinaan ideologi Pancasila.

Peta Jalan PIP merupakan pedoman yang disusun BPIP sebagai pembantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (Korsindal) atas program, kegiatan, serta subkegiatan PIP lembaga negara, K/L, dan pemerintah daerah (PEMDA) dalam rangka mengaktualisasikan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (AK PIP) secara bertahap hingga 2045.

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan telah melakukan tahap perencanaan dan identifikasi masalah. Tahap awal ini bertujuan untuk mengenali isu, permasalahan, atau kebutuhan kebijakan yang mendesak atau strategis dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Identifikasi dilakukan berdasarkan data, laporan, pengamatan, atau masukan dari mitra-mitra BPIP yang telah menandatangani Kerjasama.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 20% (Tahapan penyusunan rekomendasi):

$$\frac{\text{tahap} \text{ hingga TW I}}{(5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% = \frac{1}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 20\%$$

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	5	20%	20%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Penyusunan dokumen Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila dalam lima tahap yaitu:

Tabel 2. 3 Tahapan Penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
1.	Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah, Tahap awal ini bertujuan untuk mengenali isu, permasalahan, atau kebutuhan kebijakan yang mendesak atau strategis dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Identifikasi dilakukan berdasarkan data, laporan, pengamatan, atau masukan dari mitra-mitra BPIP yang telah menandatangani Kerjasama.
2.	Pengumpulan Data dan Informasi, Setelah masalah diidentifikasi, dilakukan pengumpulan data yang relevan dan akurat, baik berupa data primer (hasil riset, survei, wawancara) maupun data sekunder (laporan, dokumen resmi, kajian akademis) kepada mitra-mitra BPIP yang telah bekerjasama.
3.	Analisis Masalah dan Perumusan Alternatif Solusi, Data yang sudah dikumpulkan dianalisis untuk memahami akar penyebab, dampak, tren, dan potensi risiko. Analisis ini bisa bersifat kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya, tergantung pada sifat masalahnya. Berdasarkan hasil analisis, disusun beberapa opsi atau alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Setiap alternatif

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
	perlu disertai dengan kelebihan, kekurangan, risiko, dan dampaknya.
4.	Penyusunan Naskah Rekomendasi, Merupakan proses penyusunan naskah formal yang akan diajukan kepada Kepala BPIP. Naskah disusun dengan gaya bahasa resmi, struktur yang baku, dan mencakup ringkasan eksekutif, rekomendasi utama, dan lampiran data pendukung.
5.	Penyampaian Rekomendasi kepada Kepala, Tahap akhir adalah pengajuan rekomendasi secara resmi kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Hubungan antar lembaga, sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan. Penyampaian dilakukan melalui Nota Dinas yang disampaikan kepada Kepala BPIP dengan dilampirkan naskah rekomendasi.

Berdasarkan tahapan penyusunan rekomendasi kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila tahapan yang telah dicapai oleh Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama dalam menyusun rekomendasi Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif, efisien serta berkelanjutan sehingga implementasi nilai-nilai Pancasila dilaksanakan secara menyeluruh kepada elemen Masyarakat pada Triwulan I tahun 2026 adalah Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah. Berikut Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP dalam Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah:

1. Rapat internal Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama dalam penyusunan isu-isu dan kebutuhan kebijakan dan strategis bagi BPIP dalam percepatan pembumih nilai-nilai Pancasila
2. Rapat dengan melibatkan unit kerja di BPIP dan juga mitra-mitra BPIP yang telah bekerjasama dalam mengidentifikasi permasalahan tindak lanjut kerjasama pembinaan ideologi Pancasila telah dilakukan selama ini.

3. Rapat dengan mitra dilakukan baik melalui *zoom meeeting* atau mengundang mitra BPIP yang telah bekerjasama ke kantor BPIP
4. Berkoordinasi dengan mitra kerja sama BPIP untuk mendapat gambaran atas kerjasama melalui kegiatan Forum Ekspose Capaian kegiatan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Kementerian/Lembaga Tahun 2025.

Berdasarkan data diatas bahwa persentase rekomendasi hubungan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 20%.

Sehinga dapat disimpulkan capaian pada Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{tahap an hingga TW I}}{(5 \text{ tahap an penyusunan})} \times 100\% = \frac{1}{5 \text{ tahap an penyusunan}} \times 100\% = 20\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Tabel 2. 4 Aktivitas Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Audiensi dengan RTV (Jakarta, tanggal 19 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Forum Ekpose Implementasi Peta Jalan PIP KL 2025 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Januari 2026)	
3.	Penerimaan Audiensi dengan Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Jakarta, tanggal 21 Januari 2026)	
4.	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPIP dengan Sekretariat DPRD Kota Medan (Jakarta, tanggal 30 Januari 2026)	
5.	Koordinasi Optimalisasi Tindak Lanjut Kerja Sama BPIP dengan Universitas Sebelas Maret melalui Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) (Solo, tanggal 4 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Koordinasi Penandatanganan PKS BPIP dengan P3SI (Solo, tanggal 5 Februari 2026)	
7.	Koordinasi dan Konsultasi tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP) serta Usulan Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan BPIP RI (Jakarta, tanggal 10 Februari 2026)	
8.	Audiensi dan Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan LPP RRI (Jakarta, tanggal 23 Februari 2026)	
9.	Rapat Pembahasan Persiapan Monitoring Implementasi Peta Jalan 2026 Semester 1 (Jakarta, tanggal 26 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Koordinasi Penandatanganan MoU BPIP dengan UMY (Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2026)	

A.2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 11,41% (rata-rata capaian hasil Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif dan Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti):

$$\frac{\text{Capaian 2026}}{3} \times 100\% = \frac{14,23\% + 0\% + 20\%}{3} \times 100\% = 11,41\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	20.000	2.847	14,23% (2.847 orang)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif.	Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila	1.000.000 Orang	-	Belum dilakukan
Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan	1	20%	20% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

a. Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Target tahun 2026 Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila adalah 20.000 Orang Pada Triwulan I tahun 2026 telah dilakukan sosialisasi PIP terhadap 2.847 orang, dengan begitu maka presentase perhitungan adalah sebesar 14,23% dengan rincian sosialisasi yaitu:

$$\frac{\text{Capaian TW I 2026}}{20.000 \text{ orang}} \times 100\% = \frac{2.847 \text{ orang}}{20.000 \text{ orang}} \times 100\% = 14,23\%$$

Tabel 2. 6 Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No	Kegiatan	Tempat dan tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Moderasi Beragama dalam Kerangka Pancasila"	31 Januari 2026, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	293 Orang (Tokoh Agama, Dai dan Daiyah)
2.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Penguatan Ideologi Pancasila dalam Bingkai Kearifan Lokal ditengah Tantangan Arus Digital"	19 Februari 2026, Batam, Provinsi Kepulauan Riau	509 Orang (Organisasi Masyarakat, Mahasiswa dan Paskibraka)
3.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Memahami Pancasila Berbasis Keislaman"	22 Februari 2026, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat	400 Orang (Tokoh Agama dan Santri)
4.	Kegiatan Ngabuburit Kebangsaan "Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam rangka Memperkuat	24 Februari 2026, Jakarta	118 Orang (Akademisi, Guru dan Mahasiswa)

No	Kegiatan	Tempat dan tanggal Pelaksanaan	Keterangan
	Ukhuwah Islamiyah” di Universitas Nahdlatul Ulama		
5.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila ditengah Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Indonesia Raya”	28 Februari 2026, Pekanbaru, Provinsi Riau	408 Orang (Organisasi Masyarakat)
6.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Peran Mahasiswa Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila dalam rangka Membangun Peradaban Bangsa Menuju Indonesia Raya”	12 Maret 2026, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah	474 Orang (Akademisi dan Mahasiswa)
7.	Pembinaan Ideologi Pancasila Goes to Campus dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila bagi Mahasiswa dalam Mewujudkan Mahasiswa yang Berkarakter Pancasila di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	13 Maret 2026, Yogyakarta	466 Orang (Akademisi dan Mahasiswa)

b. Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Target tahun 2026 Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila adalah 1.000.000 Orang Pada Triwulan I tahun 2026 masih belum dilakukan kegiatan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan begitu maka presentase perhitungan adalah sebesar 0% dengan rincian sosialisasi yaitu:

$$\frac{\text{Capaian TW I 2026}}{1.000.000 \text{ orang}} \times 100\% = \frac{0 \text{ orang}}{1.000.000 \text{ orang}} \times 100\% = 0\%$$

c. Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan

Untuk mencapai 1 dokumen rekomendasi kebijakan hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila dibutuhkan 5 tahapan. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai 1 tahapan yaitu Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Sosialisasi dan Komunikasi PIP

maka presentase perhitungan saat ini sekitar 20 % dengan alur proses sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian 2026}}{5 \text{ Tahapan}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Tahapan tercapai}}{5} \times 100\% = 20\%$$

Tabel 2. 7 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan

No	Tahapan	Uraian	Keterangan
1.	Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Konsinyering internal dalam hal pemetaan sosialisasi dan komunikasi Pancasila	Tercapai
2.	Pengumpulan dan Analisis Data yang melibatkan pakar, <i>stakeholder</i> , dsb	Pembuatan instrument survei kegiatan luring /daring	Belum dilakukan
3.	Perumusan Strategi dan Alternatif Pendekatan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Perhitungan hasil survei, diskusi komprehensif dengan pihak terkait	Belum dilakukan
4.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Perancangan strategi sosialisasi dan komunikasi	Belum dilakukan
5.	Hasil Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Melakukan harmonisasi pedoman dan implementasi alur kebijakan	Belum dilakukan

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Tabel 2. 8 Aktivitas Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat audinesi bersama Radio Republik Indonesia (RRI) (Jakarta, tanggal 20 Januari 2026)	
2.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Raya" (Surabaya, tanggal 24 Januari 2026)	
3.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Moderasi Beragama dalam Kerangka Pancasila" (Makassar, tanggal 24 Januari 2026)	
4.	Rapat audiensi bersama Kantor Berita Radio (KBR) (Jakarta, tanggal 3 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Penguatan Ideologi Pancasila dalam Bingkai Kearifan Lokal ditengah Tantangan Arus Digital” (Batam, tanggal 19 Februari 2026)	
6.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Memahami Pancasila Berbasis Keislaman” (Lombok, tanggal 22 Februari 2026)	
7.	Kegiatan Ngabuburit Kebangsaan “Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam rangka Memperkuat Ukhuwah Islamiyah” (Jakarta, tanggal 24 Februari 2026)	
8.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila ditengah Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Indonesia Raya” (Pekanbaru, tanggal 28 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Rapat audinesi bersama CNN (Jakarta, tanggal 3 Maret 2026)	
10.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila ditengah Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Indonesia Raya” (Purwokerto, tanggal 12 Maret 2026)	
11.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Peran Mahasiswa Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila dalam rangka Membangun Peradaban Bangsa Menuju Indonesia Raya” (Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2026)	

A.3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif Triwulan I Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 8,05% $(20\%+0\%+5\%+7,2\%)/4$ (rata-rata capaian Persentase

Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti dan Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila):

$$\frac{\text{Capaian 2026}}{4} \times 100\% = \frac{20\% + 0\% + 5\% + 7,2\%}{4} \times 100\% = 8,05\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila yang Diselesaikan	2	20%	20% (Rekomendasi)
Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila	Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila	3	0%	0% (Event)
	Jumlah Fasilitas Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	100	5 (5%)	5% (Kelompok Masyarakat)
	Fasilitas dan Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila	16.000	1.154 (6,59%)	7,2% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

a. Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti

Tersusunnya Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti, yaitu saat ini masih dalam tahapan mulai tahapan

perencanaan dan indentifikasi masalah. Sehingga Jumlah Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila yang Diselesaikan, telah tercapai 20% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rekomendasi} = \frac{\text{capaian tahapan}}{5 \text{ tahapan}}$$

$$= \frac{1 \text{ tahapan}}{5 \text{ tahapan}} = 20\%$$

Adapun tahapan-tahapan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah

Tahap awal ini bertujuan untuk mengumpulkan hasil pembudayaan Pancasila dari berbagai diskusi kelompok terarah yang sudah dilakukan dan menentukan rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti.

2. Penetapan Prioritas

Setelah penentuan rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti, maka perlu menyusun skala prioritas untuk pelaksanaan berdasarkan sumber daya, waktu, dan target capaian.

3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Setelah menetapkan prioritas, perlu untuk menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur: tujuan, langkah kerja, waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab dan melibatkan pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media.

4. Implementasi Program

Pada tahap ini Direktorat Jaringan dan Pembudayaan melaksanakan pembudayaan Pancasila sesuai dengan rencana tindak lanjut.

5. Menyusun Rekomendasi Hasil Pembudayaan yang Ditindaklanjuti

Setelah dari implementasi program pembudayaan yang ditindaklanjuti, maka tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi hasil pembudayaan yang ditindaklanjuti.

b. Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila

Tahun 2026 ini target dari Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu 3 Event. Pada Triwulan I Tahun 2026 masih dalam tahap penyusunan penyusunan rencana kegiatan sehingga belum dilakukan event Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila atau sebesar 0% dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Event Pemeberian Penghargaan PIP}}{3 \text{ Event}} = \frac{0 \text{ Event}}{3 \text{ Event}} = 0\%$$

c. Fasilitasi dan Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila

Tahun 2026 ini target dari Fasilitasi dan Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila yaitu 100 Kelompok Masyarakat. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila terhadap 5 Kelompok Masyarakat atau sebesar 5% dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dan dibina}}{100 \text{ Kelompok Masyarakat}}$$
$$= \frac{5 \text{ Kelompok Masyarakat}}{100 \text{ Kelompok Masyarakat}} = 5\%$$

Adapun Kelompok Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila

No.	Nama Komunitas/Kelompok Masyarakat	Asal Komunitas
1.	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)	Jakarta
2.	Pondok Salafiah Asholihin Al Abror	Jakarta Utara, Jakarta
3.	Kampung Adat Cireundeu	Cimahi, Jawa Barat
4.	Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI)	Jakarta
5.	Lorong Buku Batavia	Jakarta Timur, Jakarta

d. **Fasilitasi dan Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila**

Triwulan I Tahun 2026 ini target dari Fasilitasi dan Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila yaitu 16.000 Orang. Pada Triwulan I Tahun 2026 tercapai 1.054 orang yang Terfasilitasi dan Terbina melalui Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila atau sebesar 7,2 % dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Relawan Pancasila yang terfasilitasi dan terbina}}{16.000 \text{ Orang}}$$

$$= \frac{1.154 \text{ Orang}}{16.000 \text{ Orang}} = 7,2\%$$

Adapun Relawan Pancasila yang terfasilitasi dan terbina tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Relawan Pancasila yang terfasilitasi dan terbina

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Kegiatan Audiensi Inovasi Pembudayaan Pancasila Bersama Kampung Adat Cireundeu Tahun 2026 di Kota Cimahi Tanggal 27 s.d. 29 Januari 2026	4
2.	Kegiatan Penguatan Jaringan Pembudayaan Pancasila Bersama Ikon Pancasila di Yogyakarta Pada Tanggal 02 s.d. 05 Maret 2026	750
3.	Kegiatan Penguatan Jaringan Relawan	300

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
	Gerakan Kebajikan Pancasila Melalui Seminar Nasional dan Penguatan Sejarah Pancasila di Surakarta, Jawa Tengah, 3 s.d. 6 Februari 2026	
4.	Kegiatan Menyapa Komunitas dan Budayawan di Pasar Gembong, Jakarta Timur Pada Tanggal 20 Februari 2026	100

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 12 Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Perencanaan Kegiatan Direktorat Jaringan dan Pembudayaan Tahun Anggaran 2026 (Jakarta, tanggal 12 Januari 2026)	
2.	Pembahasan Komunitas Oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan Bersama Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan dan Politik KEMENPPPA (Jakarta, tanggal 15 Januari 2026)	
3.	Audiensi Bersama Komunitas Musisi Jalanan Center Jakarta Pusat dalam Sinergi Pembudayaan Komunitas dengan Pemerintah Daerah dan Kunjungan Kerja ke Dinas Pendidikan DKI (Jakarta, tanggal 21 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Penyusunan <i>Best Practice</i> Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 22 Januari 2026)	
5.	Pembahasan Komunitas Perempuan dengan Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan dan Politik (Jakarta, tanggal 26 Januari 2026)	
6.	Audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Menyapa Komunitas Tahun 2026 (Bandung, tanggal 27 s.d 29 Januari 2026)	
7.	Audiensi Inovasi Pembudayaan Pancasila Bersama Kampung Adat Cireundeu Tahun 2026 (Cimahi, tanggal 27 s.d. 29 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Penguatan Jaringan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Melalui Seminar Nasional dan Penguatan Sejarah Pancasila Surakarta (Surakarta, tanggal 3 s.d. 6 Februari 2026)	
9.	Audiensi dengan IPMI untuk dukungan Pelaksanaan Saman <i>Youth Fest</i> 2026 dan pengkinian Survey Efektivitas Pembudayaan Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 9 Februari 2026)	
10.	Audiensi Bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Sinergi Pembudayaan Komunitas dengan Pemerintah Daerah (Jakarta, tanggal 9 Februari 2026)	
11.	Kegiatan Menyapa Komunitas dan Budayawan di Pasar Gembong (Jakarta, tanggal 20 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Peresmian Perpustakaan Pancasila Bersama Komunitas Literasi Lorong Batavia (Jakarta, tanggal 24 Februari 2026)	
13.	Koordinasi dan Audiensi Persiapan Jambore Kampung Tematik Indonesia (KTI) di Kota Madiun (Jakarta, tanggal 25 Februari 2026)	
14.	Diskusi Pembudayaan Pancasila Tahun 2026 Sebagai Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat (Jakarta, tanggal 26 s.d. 28 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Koordinasi Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026 dan Silaturahmi dalam rangka Kebersamaan Ramadhan (Jakarta, tanggal 2 Maret 2026)	
16.	Penguatan Jaringan Pembudayaan Pancasila Bersama Ikon Pancasila (Yogyakarta, tanggal 2 s.d. 5 Maret 2026)	
17.	Rapat Finalisasi Instrumen Survey Pembudayaan Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 10 Maret 2026)	

B. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorn*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Indikator Keberhasilan Sasaran Program Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah termanfaatkan dan ditindaklanjutnya capaian keluaran yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	REALISASI	Ket
Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	100%	24%	 24%
Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan	100%	30%	 30%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	100%	20%	 20%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

B.1. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 24% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian tahapan 2026}}{(22 \text{ rekomendasi} \times 3 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% = \frac{16 \text{ Tahapan}}{66 \text{ Tahapan}} \times 100\% = 24\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Selaras dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	22	24%	24% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Dalam hal pelaksanaan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai Pancasila pada tahun anggaran 2026 memiliki target 22 rekomendasi terhadap rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila. Dimana untuk mencapai target ini dibutuhkan 3 tahapan tiap rekomendasinya, yaitu tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penyampaian. Hingga Triwulan I Tahun 2026 (Januari s.d. Maret), Direktorat Analisis dan Penyelarasan telah melakukan beberapa tahapan dari total 66 tahapan untuk menyelesaikan 22 rekomendasi kebijakan dari rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Rekomendasi Rancangan Produk Hukum yang Diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila

No	Output	Perencanaan	Pelaksanaan	Penyampaian
1.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden	1	1	0
2.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	1	1	0
3.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	1	1
4.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian, Maritim, dan Investasi	1	0	0

No	Output	Perencanaan	Pelaksanaan	Penyampaian
5.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	0	0
6.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	0	0	0
7.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perekonomian, Maritim, dan Investasi	0	0	0
8.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	0	0	0
9.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara	0,5	0	0
10.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	0,5	0	0
11.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu	0,5	0	0
12.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan	0,5	0	0

No	Output	Perencanaan	Pelaksanaan	Penyampaian
13.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung	0,5	0	0
14.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Banten dan DKI Jakarta	0,5	0	0
15.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Jawa Barat	0,5	0	0
16.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	0,5	0	0
17.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Jawa Timur	0,5	0	0
18.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Bali, NTB dan NTT	0,5	0	0
19.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	0,5	0	0
20.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	0,5	0	0
21.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,	0,5	0	0

No	Output	Perencanaan	Pelaksanaan	Penyampaian
	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo			
22.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan	0,5	0	0

Sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 24 % dengan rincian perhitungan:

$$\frac{\text{Capaian tahapan 2026}}{(22 \text{ rekomendasi} \times 3 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{16 \text{ Tahapan}}{66 \text{ Tahapan}} \times 100\% = 24\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Tabel 2. 16 Aktivitas Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Kerja Pembahasan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026 dalam Rangka Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 12 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Audiensi DPRD Kota Medan dalam Rangka Koordinasi Perjanjian Kerja Sama dan Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD tentang Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 14 Januari 2026)	
3.	Audiensi DPRD Kota Tegal dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 14 Januari 2026)	
4.	Evaluasi dan Persiapan Kegiatan Partisipasi Bermakna Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) (Jakarta, tanggal 19 Januari 2026)	
5.	Koordinasi Teknis Penyelarasan Produk Hukum Daerah dengan Indikator Nilai-Nilai Pancasila bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Klaten, tanggal 22 s.d. 24 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Audiensi DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam Rangka Konsultasi Penjadwalan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan BPIP serta Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 28 Januari 2026)	
7.	Pembahasan Rancangan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi (Jakarta, tanggal 28 Januari 2026)	
8.	Penyusunan Bahan Rapat Kerja (Raker) Direktorat Analisis dan Penyelarasan Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 5 Februari 2026)	
9.	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 9 s.d. 10 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Jakarta, tanggal 11 Februari 2026)	
11.	Koordinasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang, tanggal 25 s.d. 27 Februari 2026)	
12.	Audiensi Penyelarasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian (Jakarta, tanggal 2 Maret 2026)	
13.	Koordinasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Pertanian (Jakarta, tanggal 4 Maret 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
14.	Audiensi DPRD Kota Medan dalam Rangka Pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kota Medan dan Audiensi DPRD Kabupaten Boalemo dalam Rangka Optimalisasi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 4 Maret 2026)	
15.	Penguatan Landasan Ideologis RUU Perkoperasian melalui Audiensi Akademik bersama Akademis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Depok, tanggal 5 Maret 2026)	
16.	Penguatan Landasan Ideologis RUU Perkoperasian melalui Audiensi Akademik bersama Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Jakarta, tanggal 6 Maret 2026)	
17.	Audiensi DPRD Kota Magelang dalam Rangka Konsultasi Penguatan Nilai Pancasila (Jakarta, tanggal 6 Maret 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
18.	Penyelarasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Sanksi dan Korban bersama Akademisi UI (Depok, tanggal 6 Maret 2026)	
19.	Penyusunan Instrumen Survei Kegiatan Partisipasi Bermakna Penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026 (Jakarta, tanggal 9 s.d. 10 Maret 2026)	
20.	Pembahasan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis dan Penyelarasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta, tanggal 11 Maret 2026)	
21.	Pembahasan Perubahan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 dan Penyelarasan Produk Hukum di Luar Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta (Jakarta, tanggal 12 Maret 2026)	

B.2. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 30% $(20\%+40\%)/2$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian 2026}}{2} \times 100\% = \frac{20\%+40\%}{2} \times 100\% = 30\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D yang Diselesaikan	6	20%	20% (Rekomendasi Kebijakan)
	Jumlah Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Diselesaikan	3	40%	40% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

a. Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D yang Diselesaikan

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian rekomendasi hasil advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap LTN/K/L/D telah dicapai 20%. Angka ini diperoleh dari penyelesaian tahapan awal dalam proses penyusunan rekomendasi, yakni inventarisasi masalah dan kendala. Artinya, proses masih berjalan dan menunjukkan progres awal yang positif. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun tahapan yang telah dilalui yaitu:

$$\frac{\text{Capaian tahapan 2026}}{(6 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{30} \times 100\% = 20\%$$

No.	Rekomendasi	Tahap 1 inventarisasi masalah dan kendala	Tahap 2 perumusan substansi dan arah kebijakan	Tahap 3 finalisasi dokumen rekomendasi	Tahap 4 penyerahan dan penetapan hasil kajian	Tahap 5 monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
1.	Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D	✓				
2.	Advokasi PIP terkait tindaklanjut Rekomendasi Buku Saku Merawat Keberagaman di Jawa Barat	✓				
3.	Advokasi PIP terkait tindaklanjut Rekomendasi Buku Saku Merawat Keberagaman di Aceh dan Maluku Utara	✓				
4.	Advokasi Goes To School Tingkat Sekolah	✓				

	Menengah Atas di Banten dan Sumatera Barat					
5.	Advokasi Goes To School Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Jawa Timur dan Tangerang Selatan	✓				
6.	Advokasi Goes To School Tingkat Sekolah Dasar di Depok, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.	✓				

b. Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Diselesaikan

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian tahapan penyusunan Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap organisasi sosial dan komponen masyarakat lainnya mencapai 40%. Persentase ini dihitung dari total lima tahapan yang direncanakan untuk total tiga rekomendasi.

Berikut adalah deskripsi mendetail mengenai tabel persentase yang menunjukkan progres dokumen rekomendasi Direktorat Advokasi:

Tahapan penyusunan rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila disusun secara berjenjang dalam lima tahap yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses yang utuh. Tahap pertama adalah Inventarisasi Masalah dan Kendala, yang dilakukan melalui pemetaan persoalan substantif dan teknis yang dihadapi oleh kelompok sasaran atau instansi yang menjadi objek advokasi. Tahap kedua adalah Perumusan Substansi dan Arah Kebijakan, mencakup penggalian informasi empiris maupun normatif yang relevan guna memperkuat dasar penyusunan rekomendasi. Tahap ketiga adalah Perumusan Rekomendasi Advokasi, yang

memuat arah kebijakan, alternatif solusi, serta bentuk intervensi pembinaan ideologi Pancasila secara konstruktif dan aplikatif. Tahap keempat adalah penyerahan dan penetapan kajian yaitu tahapan strategis untuk mengomunikasikan hasil rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Terakhir, tahap kelima adalah Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut, yakni proses pengawasan terhadap implementasi rekomendasi dan pengukuran efektivitasnya dalam menjawab permasalahan ideologis yang telah diidentifikasi sejak awal.

Setiap rekomendasi disusun dengan pola kerja yang serupa, yaitu menargetkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagai pihak yang diharapkan dapat memanfaatkan serta mengimplementasikan rekomendasi tersebut secara nyata dalam kebijakan atau program kerja. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat relevansi dan keberterimaan rekomendasi di tingkat pelaksana. Persentase capaian yang tercantum dalam laporan menunjukkan sejauh mana tahapan penyusunan rekomendasi telah dilakukan dan direspons oleh pihak-pihak terkait, baik dalam bentuk pengakuan, integrasi ke dalam kebijakan, maupun tindak lanjut konkret di lapangan, yang seluruhnya menjadi tolok ukur keberhasilan proses advokasi PIP. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan dengan rincian layanan yaitu:

$$\frac{3 \text{ Rekomendasi} \times \text{Capaian tahapan 2026}}{(3 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% \\ = \frac{6}{15} \times 100\% = 40\%$$

No.	Rekomendasi	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
		inventarisasi masalah dan kendala	Pengumpulan dan Analisis Data Pendukung	Perumusan Rekomendasi Advokasi	Koordinasi Lintas Sektor, Penyerahan dan Diseminasi	monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
1	Advokasi PIP Bidang Kegamaan	✓	✓			
2	Advokasi PIP dalam rangka Penguatan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagai Agen Keteladanan di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat	✓	✓			
3	Advokasi PIP terkait Dukungan Pengaturan Advokasi PIP di Masyarakat.	✓	✓			

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Tabel 2. 18 Aktivitas Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Dalam rangka Pembahasan Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Direktorat Advokasi" (Jakarta, tanggal 23 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Bahan/Materi Rapat Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 4 Februari 2026)	
3.	Rapat Koordinasi Lanjutan dalam Rangka Finalisasi Bahan dan Materi Rapat Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 5 Februari 2026)	
4.	Persiapan Pelaksanaan Advokasi <i>Goes To School</i> pada tingkat SD, SMP, SMA (Jakarta, tanggal 25 Februari 2026)	
5.	Persiapan Advokasi PIP terkait tindaklanjut Rekomendasi Buku Saku Merawat Keberagaman di Jawa Barat dan Wilayah Lainnya (Jakarta, tanggal 26 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Konsinyering Persiapan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila <i>Goes To School</i> (Tangerang Selatan, tanggal 2 s.d. 4 Maret 2026)	
7.	Konsinyering Finalisasi Buku Saku Advokasi "Merawat Kehidupan Keagamaan dalam Masyarakat Majemuk di Jawa Barat" (Bogor, tanggal 4 s.d. 6 Maret 2026)	
8.	Audiensi Persiapan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila <i>Goes To School</i> (Serang, tanggal 9 s.d. 12 Maret 2026)	
9.	Audiensi Koordinatif Penguatan Advokasi PIP dalam rangka Merawat Kehidupan Keagamaan Masyarakat Majemuk di Jawa Barat (Jawa Barat, tanggal 9 s.d. 12 Maret 2026)	

B.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100%

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 20% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian tahapan 2026}}{6 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = \frac{6 \text{ Tahapan}}{30 \text{ Tahapan}} \times 100\% = 20\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	6	20%	20% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Pada Tahun Anggaran 2026 Dukungan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 6 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti yakni terdiri dari 6 kluster. Sampai Triwulan I Tahun 2026 Direktorat

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam tahapan Penetapan regulasi yang akan dikaji (aduan masyarakat, inventarisasi internal, permohonan K/L lain). Dalam hal ini capaian tahapan pembentukan rekomendasi diukur dengan 5 Tahapan yaitu:

1. Penetapan regulasi yang akan dikaji (aduan masyarakat, inventarisasi internal, permohonan K/L lain).
2. Proses Analisis dan Evaluasi.
3. Penyusunan rekomendasi bekerjasama dengan para pakar, stakeholder dan akademisi.
4. Penyampaian hasil rekomendasi kepada pimpinan.
5. Penyampaian hasil rekomendasi kepada Presiden melalui pimpinan serta kepada stakeholder terkait.

Pada Triwulan I Tahun 2026, dalam penyusunan 6 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti, capaian rekomendasi telah mencapai 20%. Dalam hal ini capaian tahapan pembentukan rekomendasi diukur dengan :

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW I}}{6 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% \\ = \frac{6}{30 \text{ tahapan penyusunan rekomendasi}} \times 100\% = 20\%$$

No.	Rekomendasi Hasil Kajian	Tahap 1 Penetapan Regulasi	Tahap 2 Analisis dan Evaluasi	Tahap 3 Penyusunan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi	Tahap 4 Penyampaian rekomendasi Kepada Pimpinan	Tahap 5 Penyampaian Rekomendasi kepada Stakeholder
1.	Kluster Sistem Pendidikan Nasional serta IPTEK : UU No 20/2003 tentang Sisdiknas	✓				
2.	Kluster Sistem Ekonomi : UU No 25/1992 tentang Perkoperasian	✓				
3.	Kluster Penyelenggaraan Negara: UU No 24/2011 tentang BPJS	✓				

4.	Kluster Penyelenggaraan Negara: Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan	✓				
5.	Kluster Kebhinekaan, Keteladanan, dan Kepribadian dalam Kebudayaan: Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2025	✓				
6.	Kluster Sistem Politik Demokrasi dan Hubungan Luar Negeri: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	✓				

Tabel 2. 20 Aktivitas Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	koordinasi persiapan kegiatan kajian kebijakan dan regulasi tahun 2026 (Jakarta, tanggal 21 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Tahap Lanjut Pembahasan Program Kerja Kedeputan Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun Anggaran 2026 (Jakarta, tanggal 3 Februari 2026)	
3.	Penyusunan Proses Bisnis Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Jakarta, tanggal 7 Februari 2026)	
4.	Studi Banding terkait Mekanisme Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator Nilai Pancasila pada tanggal 12 Februari 2026 di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI (Jakarta, tanggal 12 Februari 2026)	
5.	Studi Banding terkait Mekanisme Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator Nilai Pancasila (Jakarta, tanggal 13 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Penyusunan Proses Bisnis Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Bekasi, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2026)	
7.	Kegiatan Koordinasi Kajian Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan di Pontianak (Pontianak, tanggal 8 s.d. 11 Maret 2026)	
8.	Koordinasi dan Identifikasi Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi atas Hasil Kajian Kebijakan dan Regulasi terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Manokwari (Manokwari, tanggal 8 s.d. 11 Maret 2026)	
9.	Koordinasi Kajian Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2025 di Purwakarta (Purwakarta, tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026)	

C. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Efektif

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

1. Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
2. Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
3. Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
4. Rendahnya tingkat ke dalam literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
5. Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Berdasarkan urgensi atas tugas yang diemban oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, maka Sasaran Program Deputi Bidang Pengkajian dan Materi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPIP Tahun 2025-2029 adalah berupa Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah:

Tabel 2. 21 Indikator Kinerja Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang Efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	REALISASI 2026	Ket
Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	100%	22,5%	 22,5%
Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	100%	16,25%	 16,25%
Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	100%	28,57%	 28,57%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

C.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah 22,5% (proses penyusunan kajian) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} &= \frac{(25\%+20\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{45\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 22,5\%
 \end{aligned}$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP yang diselesaikan	2	22,5%	22,5% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) rekomendasi kebijakan strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu: (1) rekomendasi sistem pengorganisasian, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) Peta Jalan PIP pemerintah daerah provinsi; dan (2) Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi. Capaian kinerja hingga triwulan I sebesar 22,5%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(25\% + 20\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{45\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 22,5\% \end{aligned}$$

Berikut merupakan detail capaian kinerja Pengkajian Kebijakan PIP pada Triwulan I Tahun 2026, dengan mempertimbangkan kalender rencana kerja yang telah disusun:

1) Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Kajian penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penyusunan rekomendasi Kebijakan. Kegiatan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dilakukan dengan 2 metode, yaitu a) penyerapan pandangan melalui pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah dan b) penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan diseminasi hasil kajian.

a) Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal Ilmiah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyerapan pandangan, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila melakukan beberapa pengelolaan jurnal ilmiah yaitu:

- Pengelolaan Jurnal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan

Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kajian kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila berupa dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada Triwulan I Tahun 2026, kajian ini berfokus pada Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia;

Pengelolaan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia, pada tahun 2026 melaksanakan dua kali penerbitan, yaitu pada periode Mei 2026 (Volume 3 Nomor 1) dan November 2026 (Volume 3

Nomor 2). Hingga triwulan I tahun 2026 telah berlangsung pengumpulan artikel melalui mekanisme *Call For Paper* pada sistem OJS sebanyak 10 (sepuluh) artikel dimana 1 (satu) artikel ditolak karena tidak memenuhi kriteria, 2 (dua) artikel telah siap terbit, dan 4 (empat) artikel sedang dalam proses penelaahan lebih lanjut.

- b) Penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan pengumpulan data dan diseminasi hasil kajian

Pada Triwulan I tahun 2026 belum dilaksanakan proses penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan pengumpulan data dan diseminasi hasil kajian. Hal ini disebabkan karena proses kajian masih berlangsung pada tahapan identifikasi maupun penyusunan metode dan instrumen kajian. Namun demikian, penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi melalui pengumpulan data dan diseminasi hasil kajian lebih lanjut akan mulai dilaksanakan pada triwulan ke II.

- 2) Penyusunan Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila

Untuk menyelesaikan Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti dilaksanakan kajian kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila berupa dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2026, pelaksanaan kegiatan masih berfokus pada penyempurnaan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila baik bagi Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi. Penyempurnaan ini meliputi proses pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila, penyusunan Matriks Subkegiatan Peta Jalan PIP pada Pemerintah Daerah Provinsi dan penyusunan rekomendasi sistem pengorganisasian, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) Peta Jalan PIP

Pemerintah Daerah Provinsi. Oleh karena itu, akan dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun Data Matriks Peta Jalan PIP Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026-2029;
2. Menyampaikan Usulan Final Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk dilakukan proses harmonisasi bersama K/L terkait;
3. Menyusun rekomendasi sistem pengorganisasian, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) Peta Jalan PIP pemerintah daerah provinsi;
4. Menyampaikan Rekomendasi Kebijakan kepada pimpinan

Berdasarkan tahapan tersebut, penghitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila hingga Triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{tahapan tahun 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 4 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% = \frac{1}{4 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 25\%$$

Pada triwulan I, penyusunan rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila masuk pada tahap penghimpunan data matriks Peta Jalan PIP Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026-2029 yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Desk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 bersama seluruh provinsi di Indonesia pada 1 s.d. 7 Maret 2026. Pada kegiatan tersebut telah hadir 38 provinsi seluruh Indonesia dengan menghasilkan Berita Acara Hasil Pembahasan *Desk Pro-SN/Tematik* Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, telah diperoleh 16 surat usulan dan matriks hasil verifikasi dari pemerintah daerah provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Sudah Menyerahkan		Belum Menyerahkan	
1.	Sumatera Barat	1.	Aceh
2.	Jambi	2.	Sumatera Utara
3.	Bengkulu	3.	Riau

Sudah Menyerahkan		Belum Menyerahkan	
4.	Kepulauan Bangka Belitung	4.	Sumatera Selatan
5.	Jawa Tengah	5.	Lampung
6.	Daerah Istimewa Yogyakarta	6.	Kepulauan Riau
7.	Bali	7.	DKI Jakarta
8.	NTB	8.	Jawa Barat
9.	Kalimantan Barat	9.	Jawa Timur
10.	Kalimantan Tengah	10.	Banten
11.	Kalimantan Selatan	11.	Nusa Tenggara Timur
12.	Kalimantan Utara	12.	Kalimantan Timur
13.	Sulawesi Tengah	13.	Sulawesi Utara
14.	Gorontalo	14.	Sulawesi Selatan
15.	Maluku	15.	Sulawesi Tenggara
16.	Papua Tengah	16.	Sulawesi Barat
		17.	Maluku Utara
		18.	Papua
		19.	Papua Barat
		20.	Papua Selatan
		21.	Papua Pegunungan
		22.	Papua Barat Daya

Terdapat 22 Provinsi yang belum menyerahkan surat usulan dan matriks hasil verifikasi dari pemerintah daerah provinsi yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila akan kembali bersurat sehingga seluruh provinsi dapat segera menyerahkan surat usulan dan matriks hasil verifikasi.

Selanjutnya, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP bersama Biro Hukum dan Organisasi akan menyampaikan rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Kementerian Hukum sebagai pemrakarsa untuk dapat segera dilakukan proses penetapan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

- 3) Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
 - a) Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Guna Penguatan argumentasi dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila khususnya yang berkaitan dengan narasi mengenai sejarah kelahiran, perumusan, hingga pengesahan Pancasila menjadi fondasi dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu merujuk pada naskah-naskah autentik.

Berkenaan dengan urgensi tersebut, sebagai tindak lanjut dari penyusunan rangkaian Naskah Sumber Arsip Dasar Negara yang dua volume sebelumnya telah diselesaikan pada tahun 2024 dan 2025 (Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945; Naskah Sumber Arsip Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) - Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK 10 s.d. 17 Juli 1945), pada tahun 2026, akan melanjutkan penyusunan volume ketiga yaitu Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) - Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945. Adapun pada Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) - Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945, dilakukan dalam beberapa tahap penyusunan, yakni:

1. Identifikasi dan Validasi Arsip
2. Gelar Naskah dan Ekspose
3. Penyusunan Rekomendasi
4. Akseptasi

Pada periode triwulan I tahun 2026, penyusunan Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) - Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945 telah melalui tahap pertama, yaitu tahap identifikasi dan validasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Penyusunan dan Penelusuran Sumber Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 25 s.d. 27 Februari 2026. Pada kegiatan tersebut berhasil

mengidentifikasi dan memvalidasi beberapa sumber primer (M. Yamin nomor 8 dan A.G. Pringgodigdo Nomor 23, 24 dan 25). Selain itu, telah diidentifikasi sumber sekunder yang berasal dari buku biografi Ahmad Soebardjo, Muhammad Hatta, Kasman Singodimedjo, dan Sukarno.

Selanjutnya, pada periode Triwulan selanjutnya, Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) - Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945 akan beralanjut pada agenda berikutnya yakni: Gelar Naskah dan Ekspose. Tahapan ini akan mengajak para ahli dan sejarawan untuk mengkritisi dan memberikan masukan-masukan pada draf yang telah dihasilkan berdasarkan sumber-sumber yang telah diidentifikasi.

b) Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi

Krisis lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ekologi tidak semata bersifat teknis, melainkan berkaitan erat dengan cara pandang dalam memaknai relasi antara manusia, alam, dan negara. Dalam praktik pembangunan, pengelolaan sumber daya alam masih cenderung berorientasi pada eksploitasi ekonomi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideologis yang hidup dalam Pancasila.

Sebagai ideologi negara, Pancasila memuat pandangan dasar mengenai hubungan harmonis antara manusia, masyarakat, dan lingkungan sebagai satu kesatuan ruang hidup. Oleh karena itu, penguatan ideologi Pancasila menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekologi, berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab antargenerasi.

Sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi

Pancasila akan menyusun kajian kebijakan strategis yang menempatkan Pancasila sebagai landasan operasional dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan kajian ini juga merupakan bagian dari pemenuhan indikator kinerja kegiatan berupa rekomendasi hasil kajian kebijakan strategis dalam rangka penyusunan dan penguatan peta jalan PIP. Adapun kajian tersebut akan dilaksanakan melalui 5 tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Kerja
2. Pengumpulan Data Kajian
3. Analisis dan Simpulan Data
4. Penyusunan Rekomendasi
5. Diseminasi Rekomendasi

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi telah sampai pada tahap pertama, yaitu proses penyusunan rencana kerja. Pada tahapan ini telah dihasilkan beberapa dokumen yaitu: 1) Kerangka Acuan Kerja Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi; 2) Dokumen Kajian Literatur terkait Urgensi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi; dan 3) Metodologi dan Instrumen Pengumpulan Data Kajian.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi pada Triwulan I 2026 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan tahun 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% = \frac{1}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 20\%$$

Pada triwulan I, Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi masih dalam tahap 1, yaitu berupa Penyusunan Rencana Kerja yang mencakup perencanaan pelaksanaan kajian selama tahun

anggaran 2026. Maka dengan demikian telah dilaksanakan 1 dari 5 tahapan keseluruhan, sehingga dapat dihitung capaian kinerja yang dicapai terkait Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi adalah sebesar 20%. Selanjutnya pada triwulan berikutnya, kegiatan akan difokuskan pada Pengumpulan Data Kajian serta Analisis dan Simpulan Data.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 23 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyusunan Rencana Kerja Tahun ANggaran 2027 Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pengelolaan APBN Tahun 2026 pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi (Jakarta, tanggal 9 Januari 2026)	
2.	Penyusunan Rencana Kinerja serta Langkah Strategis Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026 (Jakarta, tanggal 15 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Workshop Jurnal Ilmiah Menuju Terindeks Internasional Bereputasi (Bali, 8 s.d. 10 Oktober 2026)	
4.	Rapat dalam Rangka Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dan Perumusan Perencanaan Strategi Kebijakan Tahun Anggaran 2026 Deputi Bidang Pengkajian dan Materi (Jakarta, tanggal 23 s.d. 24 Januari 2026)	
5.	Penyusunan Rencana Kerja dan Identifikasi Awal Isu Strategis Atas Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi (Jakarta, tanggal 4 s.d. 6 Februari 2026)	
6.	Penyuntingan Artikel Pancasila : Jurnal Keindonesiaan Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 8 s.d. 11 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Koordinasi Pelaksanaan Desk PIP dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 20 Februari 2026)	
8.	Penyerapan Pandangan Pengelolaan Jurnal dan Persiapan Publikasi Bhineka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Volume 4 Nomor 1 (Salatiga, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2026)	
9.	Koordinasi Teknis Pelaksanaan Rakornas Musrenbang Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 23 Februari 2026)	
10.	Koordinasi Perencanaan Penyusunan dan Penelusuran Sumber Naskah Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bogor, tanggal 25 s.d. 27 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 1 s.d. 7 Maret 2026)	
12.	Penyusunan Metodologi dan Instrumen kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi (Jakarta, tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026)	
13.	Publikasi Artikel Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 6 Nomor 1 April 2026 dan Strategi Peningkatan Mutu Pasca-Akreditasi (Jakarta, tanggal 30 Maret s.d. 2 April 2026)	

C.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Materi yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 16,25% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = \frac{(12,5\% + 20\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}}$$

$$= \frac{32,5\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 16,25\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 24 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	2	16,25	16,25% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti dengan target 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) Rekomendasi yaitu 1. Rekomendasi Hasil Kajian Materi PIP bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diselesaikan dan 2. Rekomendasi Hasil Kajian Materi PIP untuk Komponen Masyarakat Lainnya yang diselesaikan. Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 16,25%, dengan rincian perhitungan:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}}$$

$$= \frac{(12,5\% + 20\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}}$$

$$= \frac{32,5\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 16,25\%$$

Rincian dari 2 Rekomendasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kajian Materi PIP bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diselesaikan

Pelaksanaan Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Ormas menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pembinaan tidak bersifat administratif semata, tetapi memiliki landasan konseptual, regulatif, dan empiris yang kuat. Kajian ini memiliki urgensi dan relevansi sebagai berikut:

- 1) Urgensi Normatif, yaitu memastikan pelaksanaan amanat regulasi terkait Ormas dan pembinaan ideologi berjalan secara sistematis dan terukur.
- 2) Urgensi Akademik, yaitu membangun materi pembinaan berbasis kajian ilmiah, teori ideologi, dan studi tentang masyarakat sipil.
- 3) Urgensi Kebijakan, yaitu menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan kementerian/lembaga lain.
- 4) Urgensi Sosial, yaitu memperkuat kohesi sosial dan ketahanan ideologi melalui kemitraan konstruktif antara negara dan Ormas

Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini disusun melalui tahapan yang sistematis, berjenjang, dan terintegrasi sejak awal hingga akhir proses. Berikut adalah tahapan pelaksanaan kajian yang disusun secara sistematis dari awal hingga akhir:

- 1) Perencanaan dan Penajaman Desain Kajian Materi
- 2) Studi Literatur dan Analisis Kebijakan

- 3) Pengumpulan Data dan Informasi Lapangan
- 4) Pelaksanaan Analisis, Sintesis, dan Perumusan
- 5) Penyusunan Dokumen Hasil Kajian dan Validasi Internal
- 6) Pelaksanaan Uji Publik Terbatas dan Penyempurnaan Substansi Kajian
- 7) Finalisasi dokumen hasil Kajian dan Diseminasi Awal
- 8) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan atas Hasil Kajian Materi

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan dalam tahapan pertama (Perencanaan dan Penajaman Desain Kajian Materi), antara lain: secara internal tim kerja menyusun perencanaan kajian materi yang dimaksud; tim kerja juga sudah melakukan audiensi dan koordinasi ke Direktorat Organisasi Kemasyarakatan-Kemendagri, dan ke Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag. Selain perencanaan, pada tahap ini juga telah dilaksanakan penajaman desain kajian materi dari pihak-pihak yang terkait dengan Organisasi Masyarakat, secara khusus melakukan identifikasi data dan isu aktual dalam bentuk kegiatan Identifikasi Data dan Isu Aktual Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam rangka Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Ormas.

Tahapan yang telah dilakukan hingga akhir Triwulan I ini telah sampai pada tahap pertama yaitu Perencanaan dan Penajaman Desain Kajian Materi dan direncanakan di Triwulan II nanti akan dilaksanakan tahapan selanjutnya.

Tahapan yang telah dilakukan hingga akhir Triwulan I ini telah sampai pada tahap pertama yaitu Perencanaan dan Penajaman Desain Kajian Materi dan direncanakan di Triwulan II nanti akan dilaksanakan tahapan selanjutnya. Dari tahapan yang sudah dilalui dapat disimpulkan bahwa capaian 1.

Rekomendasi Kajian Materi PIP bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diselesaikan adalah sebesar:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{8 \text{ Tahapan Penyusunan}}$$

$$= \frac{1 \text{ Tahapan}}{8 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 12,5\%$$

2. Rekomendasi Hasil Kajian Materi PIP untuk Komponen Masyarakat Lainnya yang diselesaikan

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.

- 1) Persiapan dan Perumusan Kerangka Konseptual yang bertujuan untuk menetapkan arah, ruang lingkup, serta fokus kajian secara jelas dan terukur.
- 2) Studi Pendahuluan melalui penelaahan regulasi, literatur ilmiah, serta hasil kajian terdahulu guna membangun basis teoritis dan normatif yang kuat.
- 3) Perancangan Metodologi yang mencakup penentuan pendekatan, teknik pengumpulan data, serta penyusunan instrumen kajian yang valid dan reliabel. Pada tahap berikutnya, pengumpulan data dilaksanakan secara komprehensif melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, survei, serta pengumpulan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang objektif, termasuk melalui

- analisis kesenjangan (*gap analysis*), analisis kebijakan, serta identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.
- 4) Penyusunan Laporan Kajian yang memuat temuan utama, rumusan masalah, serta rekomendasi kebijakan yang bersifat implementatif. Untuk menjamin kualitas dan akseptabilitas hasil kajian, dilakukan tahap validasi melalui pelibatan pakar, pemangku kepentingan, serta perwakilan komponen masyarakat lainnya, sehingga diperoleh masukan yang konstruktif dan komprehensif.
 - 5) Kajian didiseminasikan kepada pemangku kepentingan terkait melalui berbagai forum, serta ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan model pembinaan ideologi Pancasila yang adaptif dan kontekstual. Tujuannya adalah menghasilkan model, strategi, dan rekomendasi kebijakan yang efektif dan implementatif guna memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di Masyarakat.

Tahapan yang telah dilakukan hingga akhir Triwulan I ini telah sampai pada tahap pertama yaitu Persiapan dan Perumusan Kerangka Konseptual dan direncanakan di Triwulan II nanti akan dilaksanakan tahapan selanjutnya. Sehingga Capaian tersebut dapat dihitung yaitu:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{5 \text{ Tahapan Penyusunan}} \\ &= \frac{1 \text{ Tahapan}}{5 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 20\% \end{aligned}$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

**Tabel 2. 25 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi
Pembinaan Ideologi Pancasila**

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Perumusan Strategi Penyampaian Pesan Ideologis Pancasila Melalui Media Audiovisual Tentang Sejarah, Kedudukan, Pokok- Pokok Pikiran Pancasila (Depok, tanggal 9 s.d. 10 Januari 2026)	
2.	Rapat Audiensi Koordinasi Penyusunan Kajian Materi PIP Bagi Ormas Di KEMENDAGRI (Jakarta, tanggal 25 Februari 2026)	
3.	Audiensi Koordinasi Penyusunan Kajian Materi PIP Bagi Ormas Di KEMENAG (Jakarta, tanggal 26 Februari 2026)	
4.	Audiensi dengan Pusbuk - KEMENDIKDASMAN (Jakarta, tanggal 28 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Kegiatan Perumusan Draf Naskah Kajian Buku Referensi Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta, 3 s.d. 4 Maret 2026)	
6.	Identifikasi Data dan Isu Aktual Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dalam Rangka Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Ormas (Bogor, 10 s.d. 12 Maret 2026)	

C.3. Persentase Rekomendasi Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 28,57% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{(\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan})} \times 100\% = \frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi PIP yang diselesaikan	5	28,57%	28,57% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti target tahun 2026 adalah 100%, dengan rincian *output* yaitu lima (5) Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan yaitu (1) Kajian Implementasi PIP Bidang Demokrasi; (2) Kajian Efektivitas Capaian Pembelajaran (CP) dalam Membentuk Karakter Siswa; (3) Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Konsep Pembangunan Semesta Berencana; (4) Kajian Implementasi kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan; dan (5) Kajian Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan, Nasionalisme, Kepemimpinan, dan Demokrasi Indonesia dalam PIP pada Sekolah Rakyat. Hingga Triwulan I, pelaksanaan kajian telah mencapai tahapan perencanaan dan pelaksanaan awal, yang menunjukkan progres awal dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan pada triwulan berikutnya. Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 28,57%, diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tahapan kegiatan kajian yang telah direncanakan dalam satu siklus penyusunan dokumen kajian. Tahapan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) langkah utama, yaitu:

1. Perencanaan Kajian, meliputi studi literatur, identifikasi permasalahan, penentuan metodologi, penetapan lokus kajian,

- pemetaan pemangku kepentingan, serta penyusunan instrumen kajian.
2. Pelaksanaan Kajian, melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan metode observasi lapangan, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), wawancara mendalam, dialog, dan penyebaran kuesioner.
 3. Analisis dan Pengolahan Data, dilakukan melalui proses interpretasi data, identifikasi temuan utama, pola dan tren, serta penguatan validitas melalui triangulasi.
 4. Penyusunan Dokumen Kajian, berupa penyusunan laporan kajian secara sistematis yang dilengkapi dengan proses review internal dan/atau eksternal.
 5. Akseptasi, yaitu proses validasi dan penerimaan hasil kajian oleh pemangku kepentingan guna memastikan keberterimaan dan utilisasi hasil kajian.
 6. Penyusunan Naskah Rekomendasi, sebagai proses perumusan rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian yang disampaikan kepada pimpinan.
 7. Diseminasi dan Tindak Lanjut, melalui penyampaian rekomendasi kepada pemangku kepentingan serta pengembangan model implementasi, kerja sama, dan lokus binaan.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian penyelesaian Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi PIP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{7 \text{ Tahapan Penyusunan}} \\ &= \frac{2 \text{ Tahapan}}{7 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 28,57\% \end{aligned}$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

**Tabel 2. 27 Aktivitas Terlaksananya pengkajian implementasi
Pembinaan Ideologi Pancasila**

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Finalisasi Naskah Rekomendasi Strategi Implementasi Pendidikan Pancasila dan BTU Pendidikan Pancasila Pada satuan Pendidikan dibawah Koordinasi Kementerian Agama (Jakarta, tanggal 13 Januari 2026)	
2.	Temu Wicara Implementasi Pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan di Kota Bekasi (Sekolah Rakyat) (Jakarta, tanggal 15 Januari 2026)	
3.	Diskusi Awal terkait Perencanaan Implementasi Program PIP pada K/L Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 20 Januari 2026)	
4.	Pemetaan Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Bidang Demokrasi di Provinsi Jawa Barat (Bandung, tanggal 6 s.d. 7 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Forum Koordinasi Pemetaan Permasalahan dalam Rangka Pelaksanaan Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dibidang Pendidikan di Kota Bekasi (Bekasi, tanggal 26 Januari 2026)	
6.	Forum Koordinasi Pemetaan Permasalahan dalam Rangka Pelaksanaan Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dibidang Pendidikan di Kota Bogor (Bogor, tanggal 27 s.d. 29 Januari 2026)	
7.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Kajian Implementasi Efektifitas Capaian Pembelajaran (CP) dalam Membentuk Sikap Perilaku Siswa di Jawa Timur (Pamekasan, tanggal 25 s.d. 27 Februari 2026)	
8.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) <i>Brainstroming</i> Pemberdayaan Perempuan dalam Isu Ekonomi, Kesejahteraan, dan Lingkungan Hidup (Jakarta, tanggal 5 s.d. 6 Maret 2026)	
9.	Optimalisasi Pemanfaatan BTU Pendidikan Pancasila di Wilayah Jawa Barat (Jakarta, tanggal 8 Maret 2026)	

D. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komprehensif

Pengembangan kebijakan/regulasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Sistem Nasional Pendidikan dan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang komprehensif. Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan implementasi dari Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan. Perumusan program teknis dilakukan untuk memastikan advokasi kebijakan strategis yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya pembumian Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Program teknis tersebut perlu dielaborasi dalam program jangka panjang Sistem Nasional Diklat PIP dalam rangka mendukung terwujudnya pembumian Pancasila bagi aparatur negara dan seluruh komponen bangsa menuju sumber daya manusia unggul pada saat Indonesia Emas Tahun 2045. Sedangkan program teknis jangka menengah, jangka pendek, serta tahunan dielaborasi secara komprehensif dan *cascading* dimana secara agregat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut.

Sumber daya manusia Indonesia Emas tahun 2045 diharapkan mempunyai kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban dunia. Pembangunan SDM unggul tersebut perlu dilakukan secara paripurna, tidak hanya membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga membangun iman dan taqwa serta budaya sehingga menjadi insan-insan pembangunan yang religius, menguasai IPTEK, serta berbudaya luhur.

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah:

Tabel 2. 28 Indikator Kinerja Program Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komperhensif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	REALISASI	KET
Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi	100%	20%	 20%
Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi	100%	31,5%	 31,5%
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik	100%	20,85%	 20,85%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

D.1. Persentase Tenaga Pengajar Pancasila yang Tersertifikasi

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 20% proses pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{(\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan})} \times 100\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat	Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	315 20%	20% (orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh yaitu:

- Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat

Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat dengan rincian *output* Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila dari target 593 orang. Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilaporkan pada saat ini Proses persiapan pelaksanaan sertifikasi (agenda kerja sertifikasi pengajar Diklat PIP tahun 2026) dan pendaftaran sertifikasi pengajar Diklat PIP tahun 2026 telah dilakukan. Selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi dan validasi serta asesmen dan rapat pleno tim asesor sertifikasi Pengajar Diklat PIP pada triwulan II tahun 2026. Pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian *output* persentase pengajar Diklat PIP yang bersertifikat, yaitu:

Score	Kriteria Score	Keterangan
0%	Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Tahap 1: Terlaksananya verifikasi dan validasi data calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Proses Pelaksanaan
50%	Tahap 2: Tersedianya berita acara hasil asesmen peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari Tim Asesor.	Belum terlaksana
70%	Tahap 3: Tersedianya rekomendasi hasil penelusuran rekam Jejak calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari BIN.	Belum terlaksana
80%	Tahap 4: Terlaksananya Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP dan/atau Penguatan Bagi Pengajar Diklat PIP kepada calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Belum terlaksana
100%	Tahap 5: Tersedianya 315 orang Pengajar Diklat PIP bersertifikat sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Belum terlaksana

**Tabel 2. 30 Aktivitas Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila**

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Diklat PIP Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 2 Februari 2026)	
2.	Perbaikan dan Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Pengajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 18 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Persiapan Sertifikasi Pengajar Diklat PIP Tahun 2026 bersama Tim Asesor (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 Maret 2026)	
4.	Pengembangan Aplikasi Sistem Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bogor, tanggal 30 Maret s.d. 2 April 2026)	

D.2. Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi Tahun 2026 adalah 100%.

Hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 31,5% dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\left(a = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right) + \left(b = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right)}{2}$$

$$IKK = \frac{a + b}{2}$$

$$IKK = \frac{20\% + 43\%}{2} = 31,5\%$$

Keterangan :

IKK = persentase capaian indikator kinerja kegiatan

a = Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

b = Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan:

a. Terlaksananya Akreditasi Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

b. Tersedianya Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 31 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	Jumlah Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang terakreditasi	10	20%	20% (Lembaga)
Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	Jumlah NSPK Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	7	3	43% (NSPK)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

1. Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi, pada tahun 2026 memiliki target sebanyak 10 Jumlah Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang terakreditasi. Target kinerja sebanyak 10 lembaga penyelenggara Diklat PIP merupakan hasil analisis terhadap

kementerian/lembaga/pemda tempat pengajar Diklat PIP yang bersertifikat bekerja. Capaian akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP Triwulan I Tahun 2026 pada saat ini telah disusun agenda kerja akreditasi penyelenggara Diklat PIP dan rapat koordinasi dengan tim asesor akreditasi penyelenggara Diklat PIP tahun 2026. Selanjutnya akreditasi penyelenggara Diklat PIP akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2026 dengan agenda Bimbingan Teknis Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP bagi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP, Pembukaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP Tahun 2026, Rapat Verifikasi Dan Penilaian Data Akreditasi Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 dan Visitasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Periode I Tahun 2026. Pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi, yaitu:

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
0%	Fisik: Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Tahap 1 : Bimbingan Teknis Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP bagi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP	Proses Pelaksanaan
40%	Tahap 2 : DKT Penyampaian Data Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP kepada Tim Asesor	Belum terlaksana
60%	Tahap 3 : Visitasi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP (pemeriksaan data dukung)	Belum terlaksana
70%	Tahap 4 : Berita Acara Hasil Penilaian Tim Asesor Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP kepada Calon Penyelenggara Diklat PIP	Belum terlaksana
90%	Tahap 5 : Berita Acara Tim Penilai Akhir menyampaikan rekomendasi pemohon yang layak diberikan akreditasi dengan melampirkan hasil penilaian akhir akreditasi kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Belum terlaksana

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
100%	Tahap 6 : Kepala BPIP menetapkan status akreditasi bagi lembaga penyelenggara diklat untuk menyelenggarakan program Diklat PIP dan menerbitkan sertifikat akreditasi penyelenggara Diklat PIP	Belum terlaksana

2. Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan, yaitu:

Berdasarkan target kinerja sebanyak 7 NSPK, telah disetujui oleh pimpinan sebanyak 3 (tiga) dokumen yang telah disetujui pimpinan, yaitu:

- Kurikulum Diklat PIP bagi Organisasi Perempuan;
- Kurikulum Diklat PIP bagi Anggota Organisasi Sosial dan Politik; dan
- Materi Umum dan Pengayaan Diklat PIP.

Pada triwulan II dan III tahun 2026 akan dilakukan penyusunan sebanyak 4 NSPK Diklat PIP dengan melibatkan akademisi, kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, serta sasaran Diklat PIP. Pelibatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan yang membangun dalam menyusun NSPK Diklat PIP. Juknis yang disusun tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP. Petunjuk teknis tersebut memuat cara pelaksanaan Diklat PIP sesuai sarannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi Diklat PIP. Untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan dokumen petunjuk teknis yang telah disusun, dalam beberapa kegiatan pelaksanaan Diklat, akan dimonitoring dan evaluasi menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang merupakan lampiran dari Dokumen Petunjuk Teknis Diklat PIP. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pelaksanaan Diklat PIP berikutnya.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 32 Aktivitas Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Dengan BPSPDM Provinsi Kalimantan Utara (Jakarta, tanggal 20 Januari 2026)	
2.	Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota Koperasi dan Pelaku UMKM (Jakarta, tanggal 3 s.d. 6 Februari 2026)	
3.	Audiensi Disbintal AU ke Deputi Bidang Diklat (Jakarta, tanggal 20 Februari 2026)	
4.	Rapat Kerja Tim Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Periode I Tahun 2026 (Tangerang Selatan, tanggal 25 s.d. 27 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Sosialisasi Program Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 9 Maret 2026)	
6.	Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Dosen (Depok, tanggal 10 s.d. 13 Maret 2026)	

D.3. Persentase Peserta Diklat Berkepribadian Pancasila Dengan Tingkat Baik

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik pada Tahun 2026 adalah 100%.

Hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 20,85% dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\left(a = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right) + \left(b = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right)}{2}$$

$$IKK = \frac{a + b}{2}$$

$$IKK = \frac{37,5\% + 4,2\%}{2} = 20,85\%$$

Keterangan :

IKK: persentase capaian indikator kinerja kegiatan

a: Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila

b: Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan:

- a. Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila
- b. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 33 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila	6.930	37,5%	37,5% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Triwulan I Tahun 2026 untuk tercapainya Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila, yaitu:

Purnapaskibraka Duta Pancasila merupakan bagian dari kaderisasi yang pembentukannya dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam rangka mendukung proses tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Purnapaskibraka Tahun 2025 pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, sikap, dan komitmen Purnapaskibraka terhadap nilai-nilai Pancasila. Purnapaskibraka yang dinyatakan lulus selanjutnya dijadwalkan untuk mengikuti pelantikan oleh Kepala BPIP sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Setelah dilantik, Purnapaskibraka Duta Pancasila kemudian tergabung dalam wadah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) sebagai bagian dari binaan BPIP. Melalui DPPI, Purnapaskibraka Duta Pancasila ikut mendukung pelaksanaan program Paskibraka, pembinaan Purnapaskibraka, serta berbagai kegiatan kepaskibrakaan di tingkat pusat dan daerah. Keberadaan DPPI juga membantu memperkuat koordinasi antara BPIP dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan generasi muda. Oleh karena itu, pembentukan DPPI di daerah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program Paskibraka dan pembinaan nilai-nilai Pancasila. Sampai saat ini sudah ada 72 kabupaten/kota yang melakukan pembentukan DPPI.

Paskibraka menjalankan penugasan sebanyak dua kali, yaitu pada HUT RI 17 Agustus pada tahun berjalan dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni pada tahun berikutnya. Setelah menjalankan penugasan pada Hari Lahir Pancasila, baru bisa disebut sebagai Purnapaskibraka. Purnapaskibraka ini selanjutnya akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) dan lulus diklat. Purnapaskibraka yang lulus diklat baru bisa diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila (PDP). Diklat PIP untuk Purnapaskibraka dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui system *Learning Management System* (LMS). Tahapan yang harus dilalui seorang Paskibraka sebelum bisa menjadi seorang Purnapaskibraka adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pembentukan Paskibraka (Rekrutmen dan Seleksi)
- b. Tahap Pemusatan Calon Paskibraka
- c. Tahap Pelaksanaan Tugas Hari Kemerdekaan 17 Agustus
- d. Tahap Pemusatan Diklat Paskibraka untuk Hari Lahir Pancasila
- e. Tahap Pelaksanaan Tugas Hari Lahir Pancasila
- f. Purnapaskibraka
- g. Diklat PIP bagi Purnapaskibraka
- h. Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pada Triwulan I Tahun 2026, tahapan yang dijalani oleh Paskibraka tahun sebelumnya masih sampai pada tahap c, yaitu mereka selesai melaksanakan tugas pada 17 Agustus. Tugas Paskibraka tidak berhenti pada 17 Agustus, namun masih harus bertugas pada tahun berikutnya. Ada 3 tahapan lagi yang harus dilalui oleh seorang Paskibraka, yaitu pemusatan diklat untuk Hari Lahir Pancasila, pelaksanaan tugas pada Hari Lahir Pancasila, lalu mereka bisa disebut sebagai Purnapaskibraka. Purnapaskibraka ini yang kemudian bisa mengikuti Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) dan jika lulus baru bisa diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila.

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan}} \times 100\% = \frac{3}{8} \times 100\% = 37,5\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 34 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Rapat Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025 dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2026 Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka (Jakarta, tanggal 7 Januari 2026)	
2.	Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dalam Rangka Pembahasan SK Pempel Pembentukan Paskibraka 2026 (Jakarta, tanggal 9 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Rapat Koordinasi Nasional Pembentukan Paskibraka Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 13 s.d. 16 Januari 2026)	
4.	Rapat Pembentukan Paskibraka Tahun 2026 Kabupaten Muara Enim (Jakarta, tanggal 26 Januari 2026)	
5.	<i>User Acceptance Test</i> Aplikasi Transparansi Paskibraka Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 27 Januari 2026)	
6.	Kegiatan Program Mancakrida Pancasila Paskibraka (Jakarta, tanggal 30 Januari 2026)	
7.	Bimbingan Teknis bagi Admin Transparansi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Kota Palembang (Palembang, tanggal 2 s.d. 4 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Admin Transparansi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Kota Surabaya (Surabaya, tanggal 5 s.d. 7 Februari 2026)	
9.	Rapat Penyusunan Pedoman Pembelajaran Berbasis Pengalaman untuk Pemusatan Diklat Paskibraka (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026)	
10.	Koordinasi Teknis Aplikasi Transparansi Paskibraka Tahun 2026 Tingkat Kota Serang (Jakarta, tanggal 12 Februari 2026)	
11.	Pembahasan Soal Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Pada Seleksi Paskibraka Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 24 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Bimbingan Teknis bagi Admin Transparansi Paskibraka Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh (Aceh, tanggal 25 s.d. 27 Februari 2026)	
13.	Bimbingan teknis bagi para admin dan narahubung transparansi paskibraka provinsi papua selatan dan kabupaten di Merauke (Merauke, tanggal 3 s.d. 6 Maret 2026)	
14.	Koordinasi Pembentukan Paskibraka Tingkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Kota Padang Panjang, dan Kota Tangerang (Jakarta, tanggal 4 Maret 2026)	
15.	Sosialisasi Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 6 s.d. 7 Maret 2026)	
16.	Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Maret 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Pelantikan DPPI sekaligus sosialisasi dan simulasi pendaftaran seleksi paskibraka tahun 2026 di Kubu Raya (Kubu raya, tanggal 8 s.d. 10 Maret 2026)	
18.	Kunjungan ke BPSDM Kemenkumham dan PPSDM Kemendikdasmen dalam Rangka Survei Calon Lokasi Pemusatan Latihan Paskibraka Tingkat Pusat (Jakarta, tanggal 12 Maret 2026)	
19.	Kegiatan Kunjungan ke Pusdiklat BPS dan BPSDM Kemendagri dalam Rangka Survei Calon Lokasi Pemusatan Latihan Paskibraka Tingkat Pusat (Jakarta, tanggal 31 Maret 2026)	

Tabel 2. 35 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP	9.984	426	4,2% (426 Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

1. Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila, yaitu:

Berdasarkan pengukuran hasil capaian IKK pada Triwulan I Tahun 2026 untuk Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila sebesar 426 orang dari target RO 9.984 orang peserta sebesar 4,2%.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP}}{\text{Target Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP}} \times 100$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{426 \text{ orang}}{9.984 \text{ orang}} \times 100\% = 4,2\%$$

Berikut adalah rincian Peserta yang telah mengikut diklat PIP:

Tabel 2. 36 Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Kegiatan	Jumlah peserta
Diklat PIP bagi Dosen Pancasila Angkatan IV	177
Diklat PIP bagi Dosen Pancasila Angkatan V	189
Diklat PIP bagi ASN BPSDM Jawa Timur	60
Total	426

Capaian IKK tersebut didukung oleh tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan Diklat PIP, kurikulum dan modul, pengajar diklat (Maheswara), dan 19 lembaga penyelenggara Diklat PIP terakreditasi.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 37 Aktivitas Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Dosen Pancasila Angkatan IV (Jakarta, tanggal 6 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Dosen Pancasila Angkatan V (Jakarta, tanggal 27 Februari 2026)	
3.	Diklat PIP bagi ASN Kualifikasi Pratama di Lingkungan BPSDM Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur, tanggal 6 s.d. 9 April 2026)	

E. Terwujudnya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif adalah:

Tabel 2. 38 Indikator Kinerja Program Terwujudnya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	28,7%	 28,7%
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	18,75%	 18,75%
Persentase rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan	100%	33%	 33%
Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	50%	50%	 50%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

E.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 28,7% (rata-rata hasil capaian *output*).

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	5	28,7%	28,7% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

a. Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai dan menyelesaikan 5 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (100%) dibutuhkan 2 dokumen laporan penyusunan metode pengendalian (33,3%), 30 dokumen laporan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila internal dan eksternal (33,3%), dan 2 dokumen laporan penyampaian usulan langkah dan strategi(33,3%).

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026, telah tercapai:

1. Terlaksana penyusunan metode pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebanyak (0) dokumen, terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila pada internal di Lingkungan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila dan external sejumlah 11 (sebelas belas) dokumen, dan pengendalian PIP pada K/L/Pemda dan orsospol sebanyak (1) satu dokumen.

2. Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila

laporan Rekomendasi dari kegiatan yang terkumpul adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pengendalian dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Mahasiswa, Civitas Pendidik dan Komponen Masyarakat Lainnya
2. Laporan Pengendalian Dan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Di Jawa Tengah
3. Laporan Pengendalian Dan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Di Provinsi Jawa Timur
4. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Kegiatan Diklat Dosen
5. Laporan Pengendalian Paskibraka Provinsi Jawa Tengah
6. Laporan Pengendalian Desk Pembinaan Ideologi Pancasila
7. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Pengendalian dalam kegiatan Konsinyering Persiapan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Goes to School
9. Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Direktorat Jaringan dan Pembudayaan, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
10. Pengendalian dalam Kegiatan Konsinyering Finalisasi Buku Saku Advokasi “Merawat Kehidupan Keagamaan dalam Masyarakat Majemuk
11. Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Upaya

Meningkatkan Toleransi Di Kalangan Pelajar

12. Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila *Goes to Campus* yang dilaksanakan di Universitas Jenderal Soedirman

13. Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila *Goes to Campus* yang dilaksanakan di Universitas Muhammdiyah Yogya

Adapun perhitungan capaian adalah sebagai berikut:

$$\text{Metode pengendalian} = \frac{\text{Laporan Metode Pengendalian Tahun 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 2 \text{ Laporan Metode Pengendalian})} \times 33\%$$

$$\text{Metode pengendalian} = \frac{0}{2} \times 33\% = 0\%$$

$$\text{Pengendalian int dan ext} = \frac{\text{Laporan Pengendalian In dan Ex Triwulan I Tahun 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 30 \text{ Laporan Rekomendasi Kegiatan})} \times 33\%$$

$$\text{Pengendalian int dan ext} = \frac{11}{30} \times 33\% = 12,1\%$$

$$\text{Usulan langkah strategis} = \frac{\text{Laporan kegiatan dan rekomendasi 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 2 \text{ Laporan Rekomendasi Kegiatan})} \times 33\%$$

$$\text{Usulan langkah strategis} = \frac{1}{2} \times 33\% = 16,6\%$$

$$\text{Total akhir keseluruhan} = 0\% + 12,1\% + 16,6\% = 28,7\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka kegiatan pengendalian pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 40 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengendalian PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pengendalian dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Mahasiswa, Civitas Pendidik dan Komponen Masyarakat Lainnya (Surabaya, tanggal 23 s.d. 25 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Forum Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (Bekasi, tanggal 5 s.d. 7 Februari 2026)	
3.	Pengendalian Dan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Di Jawa Tengah (Semarang, tanggal 22 s.d. 24 Januari 2026)	
4.	Pengendalian Dan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Di Provinsi Jawa Timur (Surabaya, tanggal 24 s.d. 27 Februari 2026)	
5.	Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Semarang, tanggal 24 s.d. 27 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Desk Pembinaan Ideologi Pancasila Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Jakarta, tanggal 1 s.d. 4 Maret 2026)	
7.	Pengendalian dalam kegiatan Konsinyering Persiapan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Goes to School (Tangerang, tanggal 3 s.d. 4 Maret 2026)	
8.	Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Direktorat Jaringan dan Pembudayaan, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan (Yogyakarta, tanggal 3 s.d. 5 Maret 2026)	
9.	Pengendalian dalam Kegiatan Konsinyering Finalisasi Buku Saku Advokasi "Merawat Kehidupan Keagamaan dalam Masyarakat Majemuk (Bogor, tanggal 5 s.d. 6 Maret 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Upaya Meningkatkan Toleransi Di Kalangan Pelajar (Jakarta, tanggal 8 s.d. 9 Maret 2026)	

E.2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 18,75% telah dilakukannya Koordinasi internal BPIP dalam Rangka Perumusan Indikator Instrumen dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 18,75\% + 0\% = 18,75\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 41 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan PIP yang diselesaikan	3 18,75%	18,75% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

- a. Persentase rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2026 persentase rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti memiliki target 3 (tiga) Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan PIP yang diselesaikan. Dalam tahapannya rekomendasi evaluasi pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti butuh melewati 2 tahapan dengan bobot masing-masing tahapan sebesar 50% dan hingga Triwulan I Tahun 2026 capaian sudah mencapai 18,75% dimana dalam pelaksanaan telah dilaksanakan:

1. Tahap 1: Perencanaan, Pengoordinasian, dan Pemuktahiran Instrumen Evaluasi (50%)
 - a. Koordinasi internal BPIP dalam Rangka Perumusan Indikator Instrumen
 - b. Penyusunan Instrumen Evaluasi
 - c. Uji coba Instrumen Evaluasi
 - d. Evaluasi Uji coba dan Penetapan Instrumen Evaluasi

Dalam rangka penyusunan metode evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), Direktorat Evaluasi telah melaksanakan koordinasi internal antar direktorat di BPIP untuk menyamakan sudut pandang mengenai tugas dan fungsi unit kerja dari sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 sebelum menentukan Dimensi pada instrumen evaluasi yang menjadi alat ukur evaluasi hasil implementasi kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. Evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi pada Tahun Anggaran 2026 adalah Evaluasi Hasil Diklat PIP terhadap ASN Tahun 2026 dan Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Program Paskibraka. Direktorat Evaluasi bersama dengan para akademisi menyusun dimensi dan indikator yang sesuai dengan konteks tugas dan fungsi unit kerja terkait. Setelah disusunnya dimensi dan indikator yang mengacu pada teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, Direktorat Evaluasi menyusun butir-butir soal instrumen evaluasi dengan metode Skala Sikap dan *Situational Judgement Test*. Dengan disusunnya butir-butir soal instrumen, Direktorat Evaluasi sudah

menyusun sebagian instrumen evaluasi yang masih membutuhkan uji keterbacaan dan analisis IRT yang akan dilanjutkan pada Triwulan II Tahun 2026 untuk menuntaskan penyusunan instrumen evaluasi sebelum dilakukannya Uji Coba pada instrumen.

$$= \text{Capaian Kinerja} = \frac{1,5}{4} \times 50\% = 18,75\%$$

2. Tahap 2: Evaluasi Implementasi PIP dan Penyusunan Rekomendasi (50%)

- a. Evaluasi Hasil Implementasi PIP dengan menggunakan Metode Kuantitatif.
- b. Evaluasi Hasil Implementasi PIP dengan menggunakan Metode *In-depth Interview*
- c. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi

$$= \text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{3} \times 50\% = 0\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 42 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Dialog Kinerja dan Simulasi Penerapan Hasil Kerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui Aplikasi SINERGI (Jakarta, tanggal 12 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Koordinasi Rencana Kerja Direktorat Evaluasi Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 23 s.d. 27 Februari 2026)	
3.	Diskusi Kelompok Terpumpun Analisis Konteks dan Kebutuhan Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 2 s.d. 6 Maret 2026)	
4.	Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun Analisis Konteks dan Kebutuhan Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 4 Maret 2026)	
5.	Persiapan Teknis Pengambilan Data Nasional dalam Rangka Pengembangan Instrumen Evaluasi Hasil Diklat dan Pembudayaan PIP (Jakarta, tanggal 11 Maret 2026)	

E.3. Persentase rekomendasi hasil pengukuran kelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 33%, Dimana telah dilakukannya tahapan pengembangan metodologi pengukuran Pelembagaan Pancasila. dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{(\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan})} \times 100\% = \frac{2}{6} \times 100\% = 33\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 43 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Diselesaikan	2	33%	33% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

- Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Diselesaikan

Dalam tahapannya Pengukuran Pelembagaan Pancasila dibutuhkan 6 tahapan yaitu:

1. Perencanaan dan Pengkoordinasian Pengukuran Pelembagaan Pancasila;

2. Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila ;
3. Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila;
4. Perhitungan dan Analisis Data Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila ;
5. Penyusunan Hasil Rekomendasi dan Diseminasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila; dan
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila

Hingga Triwulan I Tahun 2026 yang diselesaikan sudah mencapai 33% dimana saat ini telah tercapai 2 dari 6 tahapan dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{7 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}} = \frac{2}{6 \text{ tahapan}} = 33\%$$

1. Perencanaan dan Pengkoordinasian Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan Menyelenggarakan:
 - Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Wilayah Kalimantan Tahun 2026 (Tarakan, 19 s.d. 21 Januari 2026)
 - Rapat Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, 22 Januari 2026)
 - Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah (Surabaya, 5 s.d. 7 Februari 2026)
2. Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan Menyelenggarakan:
 - Rapat Pendalaman Kerangka Pikir Pengembangan Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 3 Februari 2026)
 - Rapat Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Linimasa Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila 2026 (Jakarta, 4 Februari 2026)
 - Diskusi Kelompok Terpumpun Perhitungan Bobot Dimensi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Depok, 9 s.d. 11

Februari 2026)

- Rapat Pembahasan Matriks Dimensi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 25 Februari 2026)
- Rapat Pembahasan Bab I Pendahuluan Draf Surat Keputusan Indeks Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 26 Februari 2026)
- Rapat Pembahasan Aspek Pengawasan dan Penegakan Pilar Regulatif Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 27 Februari 2026)
- Rapat Pembahasan Surat Keputusan tentang Pedoman Indeks Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 4 Maret 2026)
- Rapat Pembahasan Aspek Perencanaan Program/Kegiatan Indikator IPLP 2026 (Jakarta, 5 Maret 2026)
- Diskusi Kelompok Terpumpun Validasi dan Penyempurnaan Indikator Pengukuran Pelembagaan Pancasila Berbasis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Bekasi, 11 s.d. 13 Maret 2026)

Tabel 2. 44 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Wilayah Kalimantan Tahun 2026 (Kalimantan Utara, tanggal 19 s.d. 21 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 22 Januari 2026)	
3.	Pendalaman Kerangka Pikir Pengembangan Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 3 Februari 2026)	
4.	Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Linimasa Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila 2026 (Jakarta, tanggal 4 Februari 2026)	
5.	Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah Jawa Timur (Surabaya, tanggal 5 s.d. 7 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Diskusi Kelompok Terpumpun Perhitungan Bobot Dimensi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Depok, tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026)	
7.	Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai Benchmark Indeks Pelembagaan Pancasila di BPS RI (Jakarta, tanggal 13 Februari 2026)	
8.	Pembahasan Matriks Dimensi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 25 Februari 2026)	
9.	Pembahasan Bab I Pendahuluan Draf Surat Keputusan Indeks Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 26 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Pembahasan Aspek Pengawasan dan Penegakan Pilar Regulatif Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 27 Februari 2026)	
11.	Pembahasan Surat Keputusan tentang Pedoman Indeks Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 4 Maret 2026)	
12.	Pembahasan Aspek Perencanaan Program/Kegiatan Indikator IPLP 2026 (Jakarta, tanggal 5 Maret 2026)	
13.	Konsultasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagai Benchmark Indeks Pelembagaan Pancasila di Bappenas (Jakarta, tanggal 6 Maret 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
14.	Diskusi Kelompok Terpumpun Validasi dan Penyempurnaan Indikator Pengukuran Pelembagaan Pancasila Berdasarkan <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> (Jakarta, tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026)	
15.	Rapat Pembahasan Konsep dan Definisi Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 31 Maret 2026)	

E.4. Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila sila 1 s.d. 5 yang ditindaklanjuti pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 50%, Dimana telah dilakukannya tahapan Monitoring proses pengambilan data IAP. dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{(\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan})} \times 100\% = \frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

**Tabel 2. 45 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi
Pembinaan Ideologi Pancasila**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
1. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 1 yang ditindaklanjuti			
2. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 2 yang ditindaklanjuti			
3. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 3 yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila Yang Diselesaikan	3 50%	50% (Rekomendasi)
4. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 4 yang ditindaklanjuti			
5. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 5 yang ditindaklanjuti			

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

- Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang Diselesaikan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila dibutuhkan 6 tahapan yaitu:

1. Pengembangan Metodologi dan Penyusunan Pedoman IAP;
2. Penghitungan IAP dan Penyusunan Laporan IAP;
3. Penyusunan Rekomendasi Hasil IAP;
4. Diseminasi Hasil Capaian IAP;
5. Monitoring dan Evaluasi Hasil Capaian IAP dan Tindak Lanjut Rekomendasi IAP
6. Monitoring Proses Pengambilan Data IAP

Hingga Triwulan I Tahun 2026 yang diselesaikan sudah mencapai 50% dimana saat telah tercapai 3 dari 6 tahapan dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{6 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}} = \frac{3}{6 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}} = 50\%$$

1. Pengembangan Metodologi dan Penyusunan Pedoman IAP dengan melaksanakan dan menyelenggarakan:
 - Rapat Pembahasan Draf Dokumen Surat Keputusan Kepala BPIP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Aktualisasi Pancasila dan Pedoman Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 14 Januari 2026);
 - Rapat Pembahasan Pedoman Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, 2 Maret 2026);
2. Penghitungan IAP dan Penyusunan Laporan IAP dengan melaksanakan dan menyelenggarakan:
 - Rapat Persiapan Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila 2025 (Jakarta, 27 Januari 2026);
 - Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Kor dan Pendataan Potensi Desa pada IAP (Jakarta, 24 Februari 2026);
 - Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Modul pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Dimensi Sila 1 dan 2 (Jakarta, 6 Maret 2026);

3. Monitoring Proses Pengambilan Data IAP dengan melaksanakan dan menyelenggarakan:
 - Koordinasi Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) di Provinsi Kalimantan Utara (Kalimantan Utara, 19 s.d. 21 Januari 2026);
 - Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Maluku (Maluku, 18 s.d. 21 Februari 2026);
 - Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Sumatera Utara (Sumatera Utara, 18 s.d. 21 Februari 2026);
 - Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat, 18 s.d. 21 Februari 2026);
 - Koordinasi dan Integrasi Indikator Mandiri IAP di Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur, 5 s.d. 7 Februari 2026);
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan (Papua Selatan, 25 Februari 2026);

Tabel 2. 46 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Aktualisasi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Pembahasan Draf Dokumen Surat Keputusan Kepala BPIP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Aktualisasi Pancasila dan Pedoman Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 14 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Koordinasi Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) di Provinsi Kalimantan Utara (Kalimantan Utara, tanggal 19 s.d. 21 Januari 2026)	
3.	Rapat Persiapan Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila 2025 (Jakarta, tanggal 27 Januari 2026)	
4.	Koordinasi dan Integrasi Indikator Mandiri IAP di Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur, tanggal 5 s.d. 7 Februari 2026)	
5.	Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Maluku (Maluku, tanggal 18 s.d. 21 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Sumatera Utara (Sumatera Utara, tanggal 18 s.d. 21 Februari 2026)	
7.	Ko Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat, tanggal 18 s.d. 21 Februari 2026)	
8.	Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Kor dan Pendataan Potensi Desa pada IAP (Jakarta, tanggal 24 Februari 2026)	
9.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan (Papua Selatan, tanggal 25 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Rapat Pembahasan Pedoman Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, tanggal 2 Maret 2026)	
11.	Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Modul pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Dimensi Sila 1 dan 2 (Jakarta, tanggal 9 Maret 2026)	

F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima berbasis Elektronik

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi kegiatan Kesekretariatan yang diarahkan pada Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik adalah:

Tabel 2. 47 Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Nilai Reformasi Birokrasi	79	-	Penilaian Reformasi Birokrasi 2026 belum dilakukan
Kategori SAKIP	B	-	Penilaian Kategori SAKIP 2026 belum dilakukan
Nilai Sistem Merit	335	-	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2026 belum dilakukan
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	-	Opini atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 oleh BPK masih proses
Indeks SPBE	4	-	Penilaian atas indeks SPBE 2026 belum dilakukan
Indeks Kepuasan Masyarakat	88	-	Survei terhadap <i>Stakeholder</i> 2026 belum dilakukan

Fokus layanan yang dilakukan dalam rangka dukungan manajemen BPIP diberikan kepada pihak internal BPIP dan K/L Pembina sebagai mitra BPIP dalam upaya penguatan kelembagaan BPIP adalah:

1. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja;

2. Layanan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
3. Layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja;
4. Layanan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan;
5. Layanan pengawasan Internal; dan
6. Layanan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik menjadi perhatian: (i) Kementerian PAN dan RB, BKN dengan Nilai Reformasi Birokrasi, Kategori implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks SPBE, Nilai Sistem Merit, dan Indeks Kepuasan Masyarakat; (ii) Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini pada laporan keuangan, dan (iii) Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait perencanaan, keuangan, dan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Beberapa perkembangan capaian strategis tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik Pada Triwulan I Tahun 2026, dicapai melalui kegiatan yaitu:

F.1. Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja

Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja hingga Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1	25%	25% (Dokumen)
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	25%	25% (Dokumen)
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Layanan Manajemen Keuangan	1	25%	25% (Dokumen)
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Layanan Penyusunan Laporan Monev	1	25%	25% (Dokumen)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	25%	25% (Dokumen)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Triwulan I Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Layanan yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab atas proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPIP secara menyeluruh. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, perumusan sasaran, serta penyelarasan dengan prioritas nasional dan kebijakan pembangunan jangka menengah. Melalui layanan ini, biro memastikan bahwa seluruh rencana kerja terstruktur secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kerangka regulasi perencanaan pembangunan nasional. Berikut adalah dokumen dan Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2026 sampai Triwulan I Tahun 2026:

1. *Bilateral Meeting* Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BPIP Tahun Anggaran 2027 pada tanggal 27 Januari 2026;
2. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Pra Raker BPIP Tahun 2026;
4. Penyampaian data awal persiapan review anggaran penyusunan Pagu Indikatif BPIP Tahun Anggaran 2027;
5. Sinkronisasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 pada aplikasi SAKTI tanggal 2 Februari 2026;
6. Rapat Kerja BPIP Tahun 2026 dengan tema “Bergerak Kompak, PIP Berdampak) tanggal 11 s.d. 14 Februari 2026;
7. *Trilateral Meeting* Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja BPIP Tahun 2027 pada bulan Februari 2026.

b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Biro Perencanaan melakukan kegiatan koordinasi dan integrasi antara perencanaan strategis dengan penganggaran berbasis kinerja. Biro merumuskan strategi alokasi sumber daya secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan BPIP. Layanan ini juga memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi antarprogram. Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Biro Perencanaan dan Keuangan sudah melakukan layanan Perencanaan sebaik mungkin misalnya dari Revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran. Berikut adalah dokumen dan layanan perencanaan dan penganggaran yang telah diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2026 sampai Triwulan I Tahun 2026 adalah:

1. Revisi DIPA 2 kali;
2. Revisi POK 3 kali;
3. Rapat Penelaahan Efisiensi Anggaran T.A. 2026 bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas;
4. Koordinasi terkait dukungan program prioritas presiden dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Penandaan Rencana Aksi Unit Kerja BPIP pada Peta Jalan PIP;

c. Layanan Manajemen Keuangan

Sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPIP, Biro Perencanaan dan Keuangan

menjalankan fungsi perbendaharaan dan akuntansi, termasuk perencanaan kas, pengelolaan belanja, hingga penyusunan laporan keuangan. Layanan ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Dalam menjalankan Layanan Manajen Keuangan Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan I Tahun 2026, telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan Layanan Keuangan;
3. Pelaksanaan audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan *Audited* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Layanan pengelolaan dan manajemen kas;
6. Layanan pengajuan penerbitan SP2D;
7. Layanan perbendaharaan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Layanan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dalam mendukung fungsi pengendalian dan akuntabilitas kinerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan layanan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui layanan ini, biro menyediakan data dan informasi berbasis hasil yang menjadi dasar perbaikan kebijakan, penyusunan laporan kinerja, serta pengambilan keputusan manajerial secara berkelanjutan. Dalam menjalankan Layanan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan I Tahun 2026 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Triwulan I 2025
3. Pemenuhan Monev Pelaksanaan Anggaran melalui e-monev Bappenas dan smart-dja;
4. Pemenuhan Dokumen SAKIP di ESR MENPAN;
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
6. Penyusunan Perjanjian Kinerja BPIP;
7. Pemenuhan dokumen Rencana Aksi BPIP.

e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan layanan ini untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana serta mencapai *output* dan *outcome* yang ditetapkan. Biro melakukan pemantauan secara berkala serta evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan guna peningkatan kualitas program BPIP secara keseluruhan. Dalam menjalankan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan I Tahun 2026 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2026;
2. Koordinasi dan penyusunan laporan pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Kantor Staf Presiden Triwulan I;
3. Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi bersama dengan BAPPENAS.
4. Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi di Lingkungan BPIP; dan

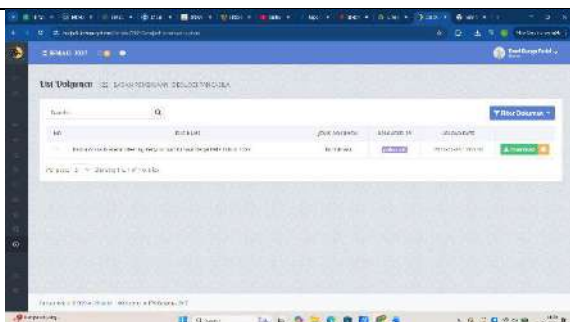
5. Evaluasi Disiplin Belanja setiap Triwulan.

Aktivitas dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan, dan kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 49 Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 14 Januari 2026)	
2.	Pembahasan Peningkatan Kepatuhan Pengelolaan Perbendaharaan Guna Pelaporan Keuangan yang Akuntabel (Surabaya, tanggal 25 s.d. 27 Januari 2026)	
3.	<i>Bilateral Meeting</i> Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BPIP Tahun Anggaran 2027 (Jakarta, tanggal 27 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 27 Januari 2026)	
5.	Rapat Pra Raker BPIP Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 28 s.d. 30 Januari 2026)	
6.	Penyampaian Data Awal Persiapan Reviu Anggaran Penyusunan Pagu Indikatif BPIP Tahun Anggaran 2027 (Jakarta, tanggal 29 Januari 2026)	
7.	Sinkronisasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Pada Aplikasi SAKTI (Jakarta, tanggal 2 Februari 2026)	
8.	Koordinasi Penyusunan Bukti Potong A2 Pegawai di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 3 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Rapat Bimbingan Teknis Pelaporan SPT A1 dan A2 Melalui Aplikasi Coretax 2026 (Jakarta, tanggal 5 s.d. 6 Februari 2026)	
10.	Rapat Kerja BPPI Tahun 2026 dengan tema "Bergerak Kompak, PIP Berdampak" (Bogor, tanggal 11 s.d. 14 Februari 2026)	
11.	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (Jakarta, tanggal 13 Februari 2026)	
12.	Penyelesaian Berita Acara <i>Trilateral Meeting</i> Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja BPPI Tahun 2027 (Jakarta, Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Prosedur Analitis Vertikal Horizontal Laporan Keuangan BPIP (Jakarta, tanggal 3 s.d. 4 Maret 2026)	

F.2. Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 50 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Layanan Hukum	1	25%	25% (Layanan)
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Triwulan I Tahun 2026

telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Uraian capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Persentase rancangan produk hukum dilaksanakan dengan rincian *output* layanan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum meliputi 2 (dua) klasifikasi utama sebagai berikut:
 - a. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP; dan
 - b. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penelaahan hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun masing-masing layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum

Rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan BPIP, sedangkan produk hukum BPIP meliputi Keputusan Dewan Pengarah/Kepala/Sekretaris Utama/Deputi BPIP, selain juga instruksi dan surat edaran.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahapan kegiatan penyusunan Peraturan BPIP meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan. Dalam perencanaan akan ditetapkan Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPIP. Tahap penyusunan dilakukan oleh pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Organisasi. Tahap pembahasan merupakan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelahnya Rancangan Peraturan BPIP akan ditetapkan oleh Kepala BPIP untuk selanjutnya diundangkan melalui pencatatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahap penyusunan keputusan dan produk hukum lainnya meliputi penyusunan dan pembahasan internal. Dalam tahap penyusunan dan pembahasan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, ahli, dan atau pihak lain yang terkait dengan materi produk hukum. Dalam beberapa penyusunan produk hukum memerlukan kegiatan studi banding dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintahan daerah sehingga produk hukum yang disusun tepat tujuan dan tepat sasaran serta dapat diimplementasikan.

b. Penelaahan Hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

- 1) Penelaahan hukum merupakan kegiatan untuk melakukan kajian terhadap produk hukum dan berbagai permasalahan hukum, yang terdiri atas analisis hukum, evaluasi produk hukum, mediasi, dan pendampingan

hukum serta asistensi penyusunan naskah Kerja Sama berupa nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya.

Objek kajian penelaahan adalah lembaga (BPIP) maupun individual (Pegawai BPIP), termasuk juga kajian terhadap produk hukum BPIP dalam kerangka pembentukan atau evaluasi produk hukum BPIP. Sedangkan mediasi dan pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang memerlukan penanganan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Asistensi penyusunan naskah Kerja Sama dilaksanakan dalam rangka menguatkan materi Kerja Sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

- 2) Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum di lingkungan BPIP meliputi pendokumentasian, penyebarluasan, dan pemeliharaan dokumen hukum. Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum tersebut telah diundangkan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP, dimana BPIP diproyeksikan JDIH BPIP menjadi sentra informasi dan dokumentasi hukum terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kegiatan pengelolaan produk hukum BPIP meliputi pendokumentasian, inventarisasi, dan penyediaan informasi produk hukum.

Pendokumentasian produk hukum BPIP dilakukan secara manual dan elektronik dalam JDIH BPIP yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Sedangkan penyediaan informasi hukum dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu dapat melalui pencetakan/penjilidan produk-produk hukum BPIP, pamflet, *standing banner*, dan berbagai media lain serta media elektronik, selain juga melakukan sosialisasi dan/atau internalisasi produk hukum yang telah diterbitkan BPIP. Pengembangan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum juga memerlukan pembangunan perpustakaan *offline* dan *online*.

Sebagai salah satu sarana penyediaan informasi hukum berbasis elektronik, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan terhadap JDIH secara berkala sehingga seluruh produk hukum BPIP dan segala dokumen berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dapat terinformasikan dan diakses oleh masyarakat luas dengan serta-merta.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian Layanan Hukum dilakukan melalui berbagai tahapan yang harus dibangun secara bertahap, berkelanjutan dan perlu melibatkan koordinasi serta Kerja Sama dengan instansi lain (K/L/Pemda) serta didukung dengan tersedianya infrastruktur (sarana prasarana) yang memadai.

Pada Triwulan I Tahun 2026 BPIP telah menerbitkan 37 Produk Hukum terdiri dari:

- a. Keputusan Kepala BPIP = 16 Dokumen
- b. Keputusan Sekretaris Utama BPIP = 13 Dokumen
- c. Keputusan Deputi 1 = 1 Dokumen

- d. Keputusan Deputi 3 = 1 Dokumen
- e. Keputusan Deputi 4 = 1 Dokumen
- f. MoU = 1 Dokumen
- g. Perjanjian Kerja Sama = 3 Dokumen
- h. SE Sekretaris Utama BPIP = 1 Dokumen

Penyusunan rancangan Peraturan BPIP dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

Tabel 2. 51 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
Keputusan Kepala BPIP		
1.	SK Kepala BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Januari 2026
2.	SK Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2 Januari 2026
3.	SK Kepala BPIP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Jurnal BPIP Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Dan Bhinneka Tunggal Ika: Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Tahun 2026	5 Januari 2026
4.	SK Kepala BPIP Nomor 3.1 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	12 Januari 2026
5.	SK Kepala BPIP Nomor 3.2 Tahun 2026 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi	12 Januari 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
	Pancasila Tahun 2026	
6.	SK Kepala BPIP Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	27 Januari 2026
7.	SK Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	27 Januari 2026
8.	SK Kepala BPIP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tim Pengkaji Pembentukan Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	27 Januari 2026
9.	SK Kepala BPIP Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah	18 Februari 2026
10.	SK Kepala BPIP Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Aktualisasi Pancasila	18 Februari 2026
11.	SK Kepala BPIP Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila	18 Februari 2026
12.	SK Kepala BPIP Nomor 10 Tahun 2026 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2026	18 Februari 2026
13.	SK Kepala BPIP Nomor 12 Tahun 2026 tentang Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2 Maret 2026
14.	SK Kepala BPIP Nomor 13 Tahun 2026 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi	9 Maret 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
	Pancasila	
15.	SK Kepala BPIP Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	17 Maret 2026
16.	SK Kepala BPIP Nomor 15 Tahun 2026 tentang Struktur Simpul Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	25 Maret 2026
Keputusan Sekretaris Utama BPIP		
17.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2027	2 Januari 2026
18.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Januari 2026
19.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sekretariat Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	5 Januari 2026
20.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	9 Januari 2026
21.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengelola Barang Persediaan Di Lingkungan BPIP Tahun 2026	9 Januari 2026
22.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029	9 Januari 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
23.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 7 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	9 Januari 2026
24.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sekretariat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	22 Januari 2026
25.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 8.1 Tahun 2026 tentang Sekretariat Forum Satu Data BPIP	22 Januari 2026
26.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Dalam Jaringan Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	12 Februari 2026
27.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	18 Februari 2026
28.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	2 Maret 2026
29.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 12 Tahun 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	9 Maret 2026
Surat Keputusan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
30.	SK Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembudayaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	16 Maret 2026
Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP		
31.	SK Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Mitra Bestari Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026	6 Maret 2026
Surat Keputusan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP		
32.	SK Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Akreditasi Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	20 Februari 2026
Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP		
33.	SE Sestama BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Periode Pelaporan Tahun 2025	2 Januari 2026
MoU		
34.	MoU Nomor MoU.01/Ka.BPIP/01/2026 antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Di Bidang Dalam Negeri	13 Maret 2026
PKS		

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
35.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi Dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Masyarakat Kota Medan Nomor PKS.01/BPIP/D.I/01/2026	30 Januari 2026
36.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi Dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Dengan Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Penguatan Sejarah Pancasila Nomor PKS.02/BPIP/D.I/02/2026	5 Februari 2026
37.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor PKS.03/BPIP/D1/03/2026	16 Maret 2026

- Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang di tindaklanjuti dilaksanakan dengan rincian *output* Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal meliputi

4 (empat) klasifikasi utama sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penataan Organisasi

Penataan organisasi menurut Peraturan Menteri PANRB terbaru, seperti PermenPANRB No. 7 Tahun 2023, diarahkan pada penyederhanaan birokrasi agar instansi pemerintah menjadi lebih lincah, efisien, dan adaptif. Salah satu langkah utamanya adalah penyederhanaan struktur organisasi dengan mengurangi jenjang jabatan struktural dan mengalihkan sebagian besar jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat profesionalisme ASN, serta meningkatkan kinerja berbasis hasil (*output* dan *outcome*).

Selain itu, penataan organisasi juga mencakup penerapan sistem kerja berbasis tim dan proyek (*team-based working*), pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan peran jabatan fungsional. Instansi pemerintah didorong untuk membentuk tim kerja lintas unit yang fleksibel dan berbasis target, sekaligus memanfaatkan sistem digital untuk mendukung fleksibilitas dan transparansi. dengan pendekatan ini, diharapkan struktur organisasi pemerintah lebih dinamis dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan. Capaian Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah Menyusun Draft Perubahan Keputusan Kepala tentang Peta Proses Bisnis. Progres dari penyusunan draf perubahan Keputusan Kepala tentang Peta Proses Bisnis sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan dari unit kerja, mengingat belum seluruh unit

menyampaikan dokumen dimaksud. Secara umum, peta proses bisnis akan memuat alur proses kerja dan keterkaitan antar unit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Langkah strategi untuk ke depannya akan dilakukan koordinasi dan rapat guna percepatan konsolidasi sebagai langkah menuju finalisasi dan penetapan dokumen, serta akan dilakukan perubahan Proses Bisnis untuk melakukan penyesuaian dengan Rencana Strategis BPIP tahun 2025 – 2029. Menyusun Draft Laporan Rencana Tindak Lanjut Kelembagaan

b. Pelaksanaan Tata Kelola Internal

1. Tata Kelola Administrasi Biro Hukum dan Organisasi

Kinerja yang dilakukan terkait ketatusahaan adalah urusan tata usaha dan rumah tangga serta penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Biro Hukum dan Organisasi di dalam Korespondensi yang terdiri Surat Masuk dan Surat Keluar mengalami perubahan terdiri dari Jumlah Kualitas dan Kuantitas. Didalam surat masuk yang meliputi nota dinas, memorandum, undangan, surat perintah, surat edaran, surat keputusan, intruksi atau surat edaran dari unit kerja lain. Surat Keluar terdiri dari nota dinas, memorandum, sprint, undangan, dan surat keluar biasa.

2. Kepuasan Layanan Biro Hukum

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Hukum dan Organisasi

sebagai salah satu penyedia dukungan manajemen di Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu diselenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penilaian pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan *Stakeholder* yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan *Stakeholder* dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat *Stakeholder*, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

c. Perencanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur negara agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Untuk memperkuat arah dan pelaksanaan reformasi ini, pemerintah telah menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 melalui Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020, yang kemudian disempurnakan dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan fokus reformasi dengan kondisi aktual, memperjelas hubungan sebab-akibat antara program reformasi dan dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta mendorong birokrasi yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan

PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan ini menggantikan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 dan menetapkan kerangka evaluasi yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Melalui evaluasi ini, instansi pemerintah diharapkan dapat secara berkala menilai kemajuan reformasi yang telah dilakukan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien. Ruang Lingkup Implementasi RB BPIP yaitu:

- a) Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024. Monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.
- b) RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga ditingkat Meso. Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan Pembangunan.
- c) RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas

sehingga berdampak langsung bagi kebijaksanaan masyarakat meliputi:

1. RB Pengentasan Kemiskinan;
2. RB Peningkatan Investasi;
3. RB mendorong Hilirisasi;
4. RB Mendorong peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional;
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Adapun Capaian RB Triwulan I Tahun 2026 adalah draft Laporan Hasil Pelaksanaan RB Tahun 2025. Progres penyusunan draf Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 telah dilaksanakan dan saat ini menunggu surat resmi hasil evaluasi dari Kementerian PANRB. Penilaian perbobotan telah tercantum dalam draf laporan dan akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Tabel 2. 52 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Lanjutan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 9 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Lanjutan Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Manajemen Risiko BPIP (Banjarnegara, tanggal 13 Januari 2026)	
3.	Rapat Lanjutan Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemantauan Program/Kegiatan di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 14 Januari 2026)	
4.	Rapat Asistensi Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 15 Januari 2026)	
5.	Rapat Pembahasan Perencanaan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 21 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Rapat Persiapan Koordinasi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 22 Januari 2026)	
7.	Rapat Koordinasi Pembaruan Rencana Aksi dan Capaian <i>Output</i> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Jakarta, tanggal 26 Januari 2026)	
8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kesbangpol Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Kelengkapan Data Penguatan Kelembagaan BPIP (Sragen, tanggal 29 s.d. 31 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Koordinasi Penyusunan Rancangan Keputusan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Tahun 2025-2029 (Jakarta, tanggal 4 Februari 2026)	
10.	Koordinasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Sidoarjo, tanggal 5 s.d. 7 Februari 2026)	
11.	Kegiatan Penerjemahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP dan Penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan BPIP (Bogor, tanggal 9 s.d. 10 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 18 Februari 2026)	
13.	Koordinasi Permohonan Diskresi Terkait dengan Persyaratan Paskibraka (Pandeglang, tanggal 20 Februari 2026)	
14.	Penyelarasan internal rancangan peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang pemberian bantuan hukum di lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 25 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Koordinasi Lanjutan Penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 27 Februari 2026)	
16.	Koordinasi Penyusunan Rancangan Keputusan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembudayaan Relawan Gerakan Kebijakan Pancasila Bersama Mitra Kerja (Jakarta, tanggal 2 Maret 2026)	
17.	Koordinasi Penyusunan Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPIP (Jakarta, tanggal 3 Maret 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
18.	Koordinasi Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 4 Maret 2026)	
19.	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 5 Maret 2026)	
20.	Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pengawasan Internal BPIP dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP (Bogor, tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026)	
21.	Bimtek terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Analisis, dan Evaluasi <i>Regulatory Impact Assessment</i> (RIA) (Jakarta, tanggal 26 Maret 2026)	

F.3. Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 53 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan kepada unit kerja atas layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	Layanan Manajemen Aset	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan BMN	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Umum	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Perkantoran	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Sarana Internal	963	25%	25% (unit)
	Layanan Manajemen SDM	441	25%	25% (Layanan)
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	95	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Beberapa capaian tersebut didukung sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara dan Layanan BMN

Merupakan layanan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengendalian, serta pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, layanan BMN telah melakukan penyusunan beberapa laporan seperti Laporan Barang Pengguna *Unaudited* Tahun Anggaran 2025, Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2026, dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2025. Laporan Barang Pengguna *Unaudited* Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang berisi tentang akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan akuntansi Barang Milik Negara yang meliputi Neraca, Laporan Barang Milik Negara, dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Sedangkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian merupakan laporan pemantauan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya.

Penyusunan Laporan yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan manajemen dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara.

b. Layanan Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimulai dari tahap

perencanaan kebutuhan khususnya Kendaraan dan anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Negara yang saat ini berada pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

c. Layanan Perkantoran

Pada Triwulan I Tahun 2026, layanan perkantoran melakukan dukungan perkantoran seperti proses pembayaran gaji dan tunjangan/hak keuangan pejabat dan pegawai BPIP dari Dewan Pengarah hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Layanan perkantoran juga memberikan layanan berupa dekorasi kantor dan proses dukungan pemeliharaan peralatan dan mesin sehingga menunjang tugas dan fungsi pegawai. Pengelolaan kendaraan dinas seperti pemeliharaan dan pembayaran pajak dilakukan sehingga pejabat atau pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut terasa aman pada saat menggunakan dan tidak mengalami hambatan. Berikut Adalah layanan perkantoran yang telah diberikan:

1. Belanja Keperluan Perkantoran
2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK, *Cartridge toner*, Buku dan Plakat)
3. Belanja Sewa (Sewa Gudang BMN dan persediaan, sewa gudang arsip, sewa alat pengolah data dan sewa mesin *fotocopy*)
4. Belanja Jasa *Event Organizer*
5. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
6. Pengecatan Gedung BPIP
7. Pemeliharaan gedung dan bangunan
8. Pemeliharaan peralatan dan mesin
9. Belanja jasa lainnya tenaga outsource

10. Belanja sewa kendaraan dinas
11. Layanan pengiriman surat
12. Dana Operasional Pimpinan
13. Honorarium pengelola APBN
14. Honorarium PPNP
15. Belanja perjalanan dinas pimpinan

d. Layanan Manajemen SDM

Pada Triwulan I Tahun 2026, Layanan manajemen SDM telah melakukan Layanan bagi seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang rutin dilaksanakan, Dimana telah dilakukan. Selain itu pada Triwulan I Tahun 2026 memiliki beberapa pencapaian yaitu:

- a. Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi (SINERGI);
- b. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMANTEN);
- c. Pelaksanaan seleksi pejabat fungsional Auditor, Pranata Komputer, Perencana, dan Statistisi melalui mekanisme mutasi;
- d. Pengembangan/pemutakhiran aplikasi SIATAP disesuaikan dengan kebutuhan untuk manajemen talenta. Bagian SDM juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan E-Kinerja bagi pegawai BPIP dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SINERGI)

e. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Triwulan I Tahun 2026, masih belum dilakukan Layanan Pendidikan Pelatihan

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 54 Aktivitas Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
2.	Kegiatan Layanan Dukungan Voucher Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	

F.4. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Kegiatan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Layanan Protokoler	1	25%	25% (Layanan)
Predikat keterbukaan informasi publik BPIP	Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	25%	25% (Layanan)
Kategori Nilai pengawasan kearsipan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat, dan administrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Adapun layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Layanan Protokoler secara khusus bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada Pimpinan, dengan berfokus pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan stake holder sehingga mewujudkan tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan, pengamanan, dan administratif yang diberikan. Beberapa aktifitas kegiatan yang diberikan dalam layanan protokoler meliputi:

1. Pengkoordinasian Layanan Tata Usaha;
2. Pengkoordinasian Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan;
3. Penyusunan Agenda Pimpinan;
4. Fasilitasi dan Pendampingan Acara Pimpinan;
5. Penyusunan Materi Pimpinan;
6. Penyelenggaraan Rapat Unsur Pimpinan;
7. Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan;
8. Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila;
9. Pelatihan Layanan Keprotokolan; dan
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Layanan Protokoler.

Layanan Protokoler telah dilaksanakan Pada Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Adapun layanan yang dilakukan berfokus pada pendampingan Unsur Pimpinan, Pengurusan tata usaha dan rumah tangga, serta pembuatan materi (berupa *speech notes* dan/atau bahan paparan), rapat pimpinan dan protokol kegiatan Unsur Pimpinan yang sejalan dengan pendampingan unsur pimpinan.

Pendampingan unsur Pimpinan yang telah dilakukan sepanjang Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) kegiatan, dengan kegiatan lebih banyak diadakan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Namun, kegiatan-kegiatan juga menyentuh wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), seperti daerah Papua, Maluku, dan juga Kalimantan dan Kepulauan Natuna.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, kegiatan pendampingan Unsur Pimpinan mengalami beberapa perbaikan seperti perencanaan yang lebih terarah, pelaksanaan kegiatan yang lebih tertata dan teratur, serta adanya evaluasi terhadap layanan protokol yang dilaksanakan oleh mitra unit kerja/kementerian/

lembaga/pemerintah daerah terkait pada kegiatan-kegiatan tersebut. Perencanaan itu diwujudkan dengan rutusnya dilaksanakan rapat-rapat persiapan kegiatan yang dilakukan dengan mitra unit kerja/kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kegiatan-kegiatan masing-masing sebelum kegiatan dilaksanakan, juga disebarkan survei terkait evaluasi dari mitra sehubungan dengan kinerja layanan keprotokolan yang sudah diberikan, sebagai wujud nyata langkah perbaikan layanan keprotokolan.

Pada Triwulan I Tahun 2026 juga, penetapan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 19 Triwulan I Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Keprotokolan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dilaksanakan. Langkah ini merupakan perkembangan/improvement dari layanan keprotokolan yang belum mengalami perubahan dalam hal pedoman, sejak tahun 2022. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, maka penyelenggaraan layanan protokoler akan lebih terarah dan jelas serta teratur. Adapun langkah selanjutnya yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah penyusunan dan penetapan Standar Operasional Pelayanan sebagai dokumen lanjutan dari Petunjuk Teknis yang sudah ditetapkan.

Beberapa kegiatan Triwulan I Tahun 2026 dalam bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokoleran untuk pemenuhan dari pencapaian tata usaha dan administrasi adalah penyelenggaraan Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas dan Rapat Pleno. Adapun rapat-rapat tersebut dilaksanakan pada:

RAPAT	TANGGAL
Rapat Koordinasi Pimpinan	13 Januari 2026
Rapat Pleno	21 Januari 2026
Rapat Pra Raker BPIP	28 Januari 2026
Rapat Kerja BPIP	12 Februari 2026

b. Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik

Layanan Tata Kehumasan dan Pengeolaan Informasi Publik menunjukkan berdasarkan data laporan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan performa yang sangat impresif dalam mengelola strategi komunikasi publik dan diseminasi informasi. Secara keseluruhan, upaya pembangunan citra positif lembaga dilakukan melalui pendekatan multi-kanal yang mencakup media konvensional dan digital, dengan fokus utama pada penguatan nilai-nilai kebangsaan di ruang siber.

Capaian Triwulan I Tahun 2026 menggambarkan keberhasilan BPIP dalam menjaga relevansi Pancasila di era digital. Strategi komunikasi tidak lagi hanya bersifat searah, tetapi telah bertransformasi menjadi gerakan digital yang partisipatif. Tingginya angka engagement dan dominasi sentimen positif menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja lembaga. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat bagi Humas BPIP untuk terus meningkatkan inovasi konten pada tahun mendatang, dengan tetap mempertahankan kredibilitas di media massa arus utama dan memperkuat resonansi ideologi di ruang publik digital yang dinamis.

Dalam Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang merupakan suatu metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana lembaga publik, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, memenuhi prinsip transparansi dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa publik memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan proses administrasi negara, yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan publik.

Penilaian IKIP berlandaskan pada berbagai aturan hukum yang mengatur hak akses informasi publik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Selain itu, aturan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (KIP) seperti Peraturan KIP No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Secara umum, penilaian IKIP dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana badan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Indikator-indikator tersebut dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan Informasi: Mengukur sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara terbuka, baik melalui website atau media lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP.
2. Aksesibilitas Informasi: Menilai kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi yang disediakan, termasuk kemudahan navigasi pada situs web badan publik, serta cara dan prosedur untuk mendapatkan informasi.
3. Kualitas Informasi: Mengevaluasi kelengkapan, kejelasan, dan ketepatan waktu informasi yang disediakan oleh badan publik, apakah informasi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Informasi.
4. Pelayanan Permohonan Informasi: Mengukur responsivitas dan efisiensi dalam menangani permohonan informasi yang

diajukan oleh masyarakat, serta apakah prosedur yang diikuti transparan dan tidak berbelit-belit.

5. Partisipasi Masyarakat: Mengidentifikasi sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan atau pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan publikasi informasi.
6. Sanksi dan Pengawasan: Melihat sejauh mana badan publik mematuhi aturan keterbukaan informasi, serta adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang diberlakukan jika badan publik gagal memenuhi kewajibannya.

Penilaian terhadap indikator-indikator tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi atau lembaga independen yang ditunjuk, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang tingkat keterbukaan informasi suatu badan publik. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna memperkuat demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan oleh BPIP dalam proses penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik meliputi:

1. Penilaian atas sarana dan prasarana BPIP;
2. Penilaian atas kualitas informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
3. Penilaian atas jenis informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
4. Penilaian atas komitmen BPIP melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Penilaian atas inovasi dan strategi dalam BPIP; dan
6. Penilaian atas digitalisasi di lingkungan BPIP.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2026 masih belum dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

c. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 didasarkan pada instrumen baku yang ditetapkan oleh ANRI melalui Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal (60%) dan nilai pengawasan kearsipan internal (40%). Implementasi strategi ini difokuskan pada pemenuhan portofolio yang autentik dan penanganan titik kritis sesuai instrumen Kepka ANRI Nomor 130 Tahun 2025.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan predikat pengawasan kearsipan, Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi menerapkan rencana aksi yaitu melakukan sinkronisasi Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) dan Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE). Dengan mengintegrasikan hasil ASKI ke dalam persiapan ASKE, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh rekomendasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga target capaian nilai kearsipan pada tahun anggaran 2026 dapat terealisasi secara optimal dan akuntabel.

Titik kritis pelaksanaan program kearsipan pada Triwulan I tahun 2026 berfokus pada penguatan landasan operasional dan legalitas guna memitigasi risiko penurunan nilai pengawasan. Fokus utama diletakkan pada penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selaras dengan 20 rekomendasi ASKE Tahun 2025 oleh ANRI, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) serta percepatan penerbitan Surat Keputusan Kepala Tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal

Tahun 2026. Perubahan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Penyempurnaan Surat Keputusan Kepala Tentang Tim Simpul Jaringan dan Persiapan Data SIKN/JIKN dengan struktur data pada simpul jaringan dan persiapan data arsip yang akan diunggah ke Sistem Informasi Kearsipan Nasional.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di pengelolaan arsip dinamis di lingkungan penciptaan lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari:

Beberapa kendala dan rencana tindak lanjut capaian Indikator Kinerja Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 56 Pengawasan Kearsipan

No.	Aspek	Kegiatan	Kendala/Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut/Perkembangan
1	Aspek Pembinaan	Penerapan Gerakan Nasional Standar Tertib Arsip (GNSTA)	1. BPIP belum sepenuhnya menerapkan sasaran tertib arsip pada aspek pengelolaan arsip. 2. Pemusnahan dan penyerahan arsip statis ke	1. Menyusun laporan GNSTA yang memuat progres penyusutan arsip BPIP serta rencana pemusnahan dan penyerahan

No.	Aspek	Kegiatan	Kendala/Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut/Perkembangan
			ANRI belum dilaksanakan 3. Ketersediaan Arsiparis belum sesuai dengan rekomendasi ANRI	arsip statis ke ANRI tahun 2026 2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan GNSTA terkait pemusnahan dan usul serah arsip statis.
2	Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	Pelaksanaan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	1. Unit kearsipan BPIP belum melaksanakan pemusnahan arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip 2. Unit kearsipan BPIP belum melaksanakan penyerahan arsip statis sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip	1. Penyusunan draf Keputusan Kepala panitia penilai arsip 2026 serta Pembentukan tim panitia penilai arsip 2. Melakukan penyeleksian arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA). 3. Menyusun daftar arsip usul musnah. 4. Menyusun daftar arsip usul serah
3.	Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/ Jaringan	1. Belum mengunggah seluruh arsip ke website SIKN sebanyak 1.440 arsip	1. Menyusun daftar arsip siap unggah 2026 serta perencanaan unggah arsip secara

No.	Aspek	Kegiatan	Kendala/Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut/Perkembangan
		Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	2. Belum melaksanakan pameran virtual pada aplikasi JIKN sebanyak 2 pameran	bertahap setiap bulan 2. Membuat klasifikasi arsip pada website SIKN sebagai wadah pengelompokan arsip yang akan diunggah 3. Telah mengunggah sebanyak 337 arsip ke website SIKN
4	Aspek Sumber Daya Kearsipan	Penyusunan dan implementasi rencana kebutuhan pengembangan kompetensi kearsipan	1. Pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi kearsipan baru mencapai sekitar 60% dari target yang telah ditetapkan	1. Melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan arsiparis secara sistematis berdasarkan kebutuhan kompetensi di lingkungan BPIP 2. Menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan arsiparis kepada PPSDM ANRI 3. Melakukan

No.	Aspek	Kegiatan	Kendala/Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut/Perkembangan
				monitoring terhadap pelaksanaan dan jadwal pelatihan
5.	Aspek Sumber Daya Kearsipan	Pemenuhan persyaratan kompetensi arsiparis.	- Arsiparis yang telah memenuhi persyaratan kompetensi melalui Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Fungsional Arsiparis sebanyak 6 orang dari total 31 arsiparis. - Persentase pemenuhan kompetensi arsiparis baru mencapai sekitar 19%	- Perencanaan program pelatihan bagi arsiparis pada tahun 2026. - Pemenuhan kebutuhan arsiparis melalui skema PPPK tahun 2026/2027 dan CPNS tahun 2027 - Mengikutsertakan arsiparis yang belum memenuhi kompetensi dalam diklat fungsional arsiparis - Ahli Pertama 2 Orang - PPPK 2 orang - CPNS 6 Orang

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat dan administrasi pada Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 57 Aktivitas Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan-Dewan Pengarah (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari s.d. Maret 2026)	
2.	Ratas Terbatas Unsur Pimpinan BPIP (Januari s.d. Maret 2026)	
3.	Rapat Pleno Unsur Pimpinan BPIP (Januari s.d. Maret 2026)	
4.	Peliputan Kegiatan BPIP (Januari s.d. Maret 2026)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Kunjungan Mahasiswa Universitas Ganesha ke BPIP (Jakarta, tanggal 6 Februari 2026)	
6.	Penyusunan Rencana Kerja Kearsipan Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 14 Januari 2026)	
7.	Rapat Penyusunan Timeline dan Program Kerja Arsip Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 19 Januari 2026)	
8.	Rapat Tindak Lanjut Program Unit Kearsipan Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 21 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (Jakarta, tanggal 26 Januari 2026)	
10.	Rapat Teknis Persiapan Raker Internal Biro Fasilitasi Pimpinan, Humas dan Administrasi (Jakarta, tanggal 4 Februari 2026)	
11.	Rapat Anggaran Terkait Persiapan Raker Internal Biro Fasilitasi Pimpinan, Humas dan Administrasi (Jakarta, tanggal 5 Februari 2026)	
12.	Rapat Perencanaan dan Pembagian Kerja LAKE Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 9 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal Bersama ANRI (Jakarta, tanggal 10 Februari 2026)	
14.	Tindak Lanjut Penyusunan Agregat di Lingkungan BPPI dan Sosialisasi Fitur Baru SIKN (Jakarta, tanggal 19 s.d. 20 Februari 2026)	
15.	Rapat Kegiatan Sosialisasi Input Data dan Informasi Arsip Pada Simpul Jaringan di Lingkungan BPPI (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Februari 2026)	
16.	Penyusunan Tentang Tim Pengawas Internal dan Tim Pengawas Penyusutan Arsip Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 3 Maret 2026)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Sosialisasi Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal dan Strategi Persiapan Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 30 s.d. 31 Maret 2026)	

F.5. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 58 Indikator Kinerja Kegiatan pengawasan internal di lingkungan BPIP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	1	25%	25% (Dokumen)
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	3	25%	25% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan I Tahun 2026 Tahun Anggaran 2026 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%.

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 Organisasi dan tata Kerja BPIP Bahwa dalam melaksanakan tugas Biro

Pengawasan Internal mempunyai Tugas dan fungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Sebagaimana Keputusan Sekretaris Utama Nomor 5 tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Biro Pengawasan Internal Tahun 2026 dimana memiliki Program Kerja, antara lain Audit, Reviu, Evaluasi, Pengawasan Lainnya.

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;
2. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5); dan
3. Prosentase Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator atau alat ukur dalam mencapai sasaran kegiatan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan Sasaran Program. Di samping itu indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan pengawasan Biro Pengawasan Internal. Indikator Kinerja Biro pengawasan Internal 2 (dua) sasaran kegiatan Perjanjian Kinerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yaitu:

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;

Pada Triwulan I Tahun 2026 Capaian indikator kinerja kegiatan pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dimana merupakan hasil

pengawasan dari evaluasi BPK yang telah ditindaklanjuti capaian dengan persentase 25%. (Layanan selama 3 bulan).

b. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5);

Nilai tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas tata kelola, efektivitas manajemen risiko, serta keandalan pengendalian intern di lingkungan BPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BPKP Tahun 2025, nilai maturitas SPIP BPIP tercatat sebesar 3,057 (Level 3 – Terdefinisi). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,0, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 101,9%, yang menunjukkan bahwa secara umum sistem pengendalian intern telah berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

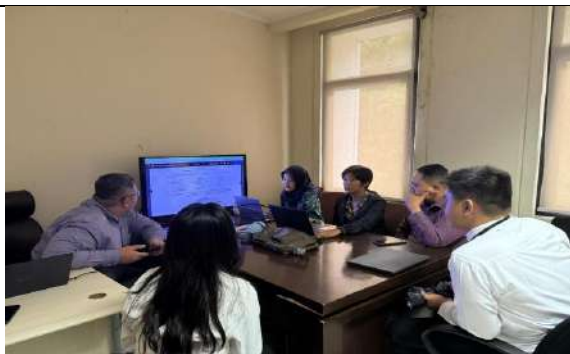
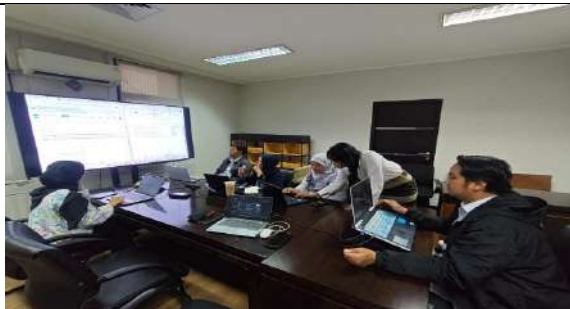
Secara internal, dalam rangka penguatan kualitas penilaian:

- Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) mencapai nilai 3,958
- Hasil penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh APIP sebesar 3,831

Hal ini menunjukkan adanya optimisme capaian internal, namun terdapat koreksi pada saat evaluasi eksternal oleh BPKP yang menetapkan nilai pada 3,057, sehingga mengindikasikan masih adanya gap antara persepsi internal dan validasi eksternal.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 59 Aktivitas Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BPIP Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 8 s.d. 15 Januari 2026)	
2.	Monitoring Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 2 Januari s.d. 30 April 2026)	
3.	Pendampingan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Jakarta, tanggal 20 Januari s.d. 30 April 2026)	
4.	Reviu Rencana Aksi dan <i>Output</i> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIP 2025 (Jakarta, tanggal 29 Januari s.d. 11 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Reviu pada Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 (<i>Unaudited</i>) (Jakarta, tanggal 4 s.d. 18 Februari 2026)	
6.	Rapat Koordinasi Penyelarasan Data atas Pelaksanaan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Jakarta, tanggal 4 s.d. 6 Februari 2026)	
7.	Rapat Pendampingan Evaluasi atas Kapabilitas APIP BPIP Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 9 s.d. 10 Februari 2026)	
8.	Finalisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2026 dan Tindak Lanjut atas Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Biro Pengawasan Internal BPIP (Jakarta, tanggal 24 s.d. 26 Februari 2026)	Dokumentasi 24 Februari 2026  Dok. 1. Pembukaan kegiatan oleh Pembaue Acara serta Foto bername peserta 

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Pendampingan Evaluasi atas Kapabilitas APIP Tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Jakarta, tanggal 5 Februari s.d. 31 Maret 2026)	

F.6. Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 60 Indikator Keluaran Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	Layanan Data dan Informasi	1	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Berikut adalah Layanan yang telah diberikan Pusat Data dan Teknologi sampai dengan:

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini, Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Saat ini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi BPIP. Berikut rincian pencapaian hingga bulan Desember 2026, antara lain:

1. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting dalam pemerintahan karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa layanan TIK sangat penting dalam konteks pemerintahan:

- Peningkatan Efisiensi Administrasi

Penggunaan TIK memungkinkan untuk mengotomatiskan banyak proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, yang mengurangi beban kerja dan meningkatkan kecepatan pemrosesan data

- Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem informasi yang transparan memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran dikelola, bagaimana kebijakan diambil, dan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

- Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Akurat

dengan TIK, data yang terkumpul bisa diproses dan dianalisis dengan cepat, memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.

- Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

TIK memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai lembaga pemerintahan. Sistem berbasis digital memungkinkan berbagai instansi untuk berbagi informasi dan beKerja Sama dalam menangani isu-isu nasional dengan lebih Efektif . Misalnya, aplikasi SAKTI untuk penganggaran, Srikandi untuk persuratan, aplikasi Transparansi untuk Paskibraka, dan lain sebagainya.

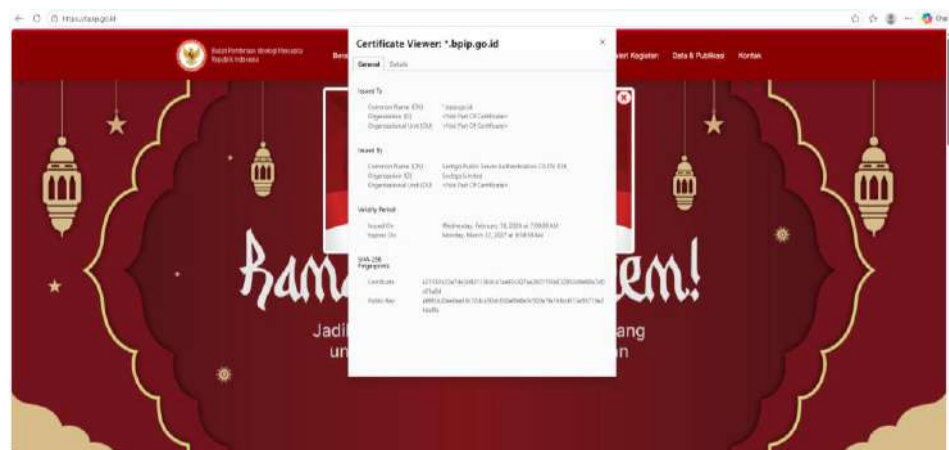
- Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data

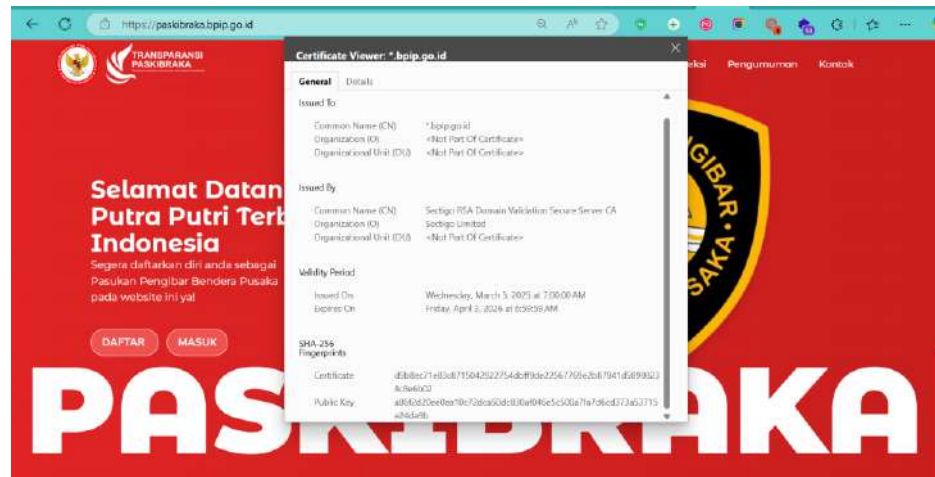
Teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengamankan data sensitif. Sistem keamanan yang baik dapat melindungi data dari ancaman peretasan, penyalahgunaan, atau kebocoran informasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP telah melaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi dalam rangka memenuhi sasaran kinerja layanan TIK. Berikut rincian pencapaian sampai dengan bulan Desember 2026, antara lain:

- a. Pemasangan *Secure Socket Layer (SSL) Website* BPIP Periode 2026-2027

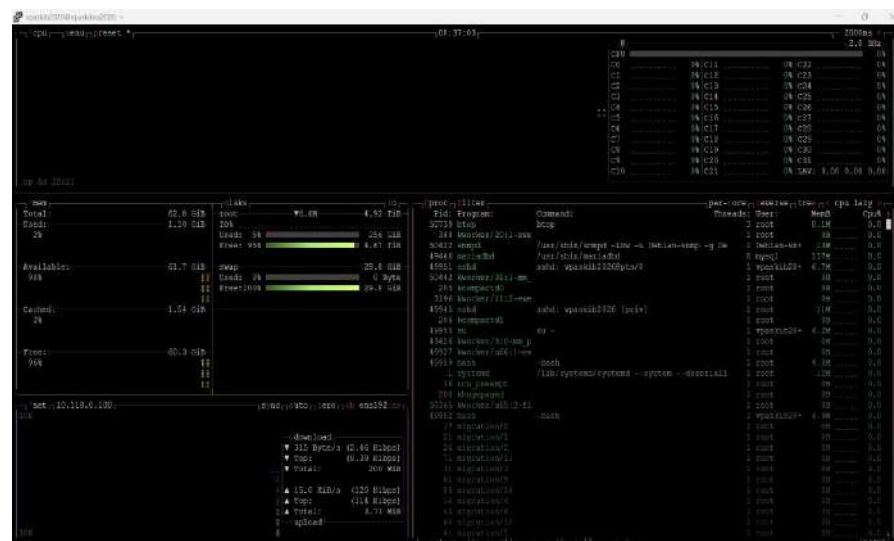
Pusat Data dan Teknologi Informasi telah melakukan pembaharuan periodiasi pada SSL untuk *website-website* BPIP untuk menjamin keamanan website BPIP:





b. **Penyiapan Server Paskibraka BPMP tahun 2026**

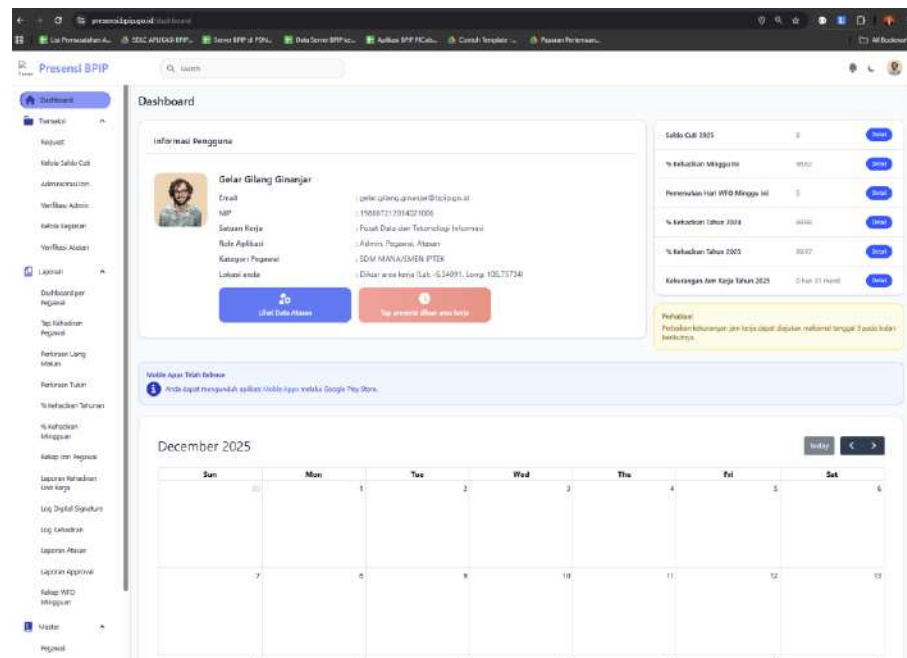
Penyiapan Server Paskibraka BPIP tahun 2026 dilakukan melalui pemberdayagunaan Server Sebelumnya yang sudah ada, dan dilakukan *re-install* menggunakan *Operating System* terbaru. Agar kestabilan kinerja Server Meningkat dan semakin Baik.



c. Implementasi Penyempurnaan Sistem Informasi Pengembangan Sistem Presensi Digital BPIP dilaksanakan untuk menjawab tantangan operasional dalam pengelolaan kehadiran pegawai, khususnya terkait akurasi data, validasi kehadiran berbasis lokasi, pencatatan kehadiran pada kegiatan khusus seperti apel dan upacara hari besar, serta kebutuhan

monitoring kehadiran secara *real-time* oleh Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi informasi BPIP dan dikelola secara terpusat dengan dukungan teknis dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatekin).

Diharapkan pengembangan Sistem Presensi Digital BPIP dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta menjadi landasan yang kuat bagi proses implementasi, evaluasi, dan pengembangan sistem di masa mendatang dalam rangka mendukung tata kelola sumber daya manusia BPIP yang profesional dan akuntabel.



d. Kunjungan website utama BPIP

Selama Pada Triwulan I Tahun 2026 website utama BPIP <https://bpip.go.id> telah dikunjungi sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Statistik Pengunjung Website BPIP 2026 Triwulan 1



Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BPIP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 61 Aktivitas Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Aplikasi Paskibraka (Jakarta, tanggal 13 Januari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Fitur Aplikasi Presensi BPIP serta Pembahasan Lanjutan Peta Rencana SPBE di BPIP (Tangerang Selatan, tanggal 5 s.d. 7 Februari 2026)	
3.	Rapat <i>User Acceptance Test</i> (UAT) Aplikasi Presensi (Jakarta, tanggal 24 Februari 2026)	
4.	Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Integrasi Tanda Tangan Elektronik serta Penetapan Kegiatan Prioritas Penilaian EPSS BPIP (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Maret 2026)	
5.	Rapat Pengembangan website E-PPID sesuai indikator KIP 2026 (Jakarta, tanggal 12 Maret 2026)	

BAB III REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2026

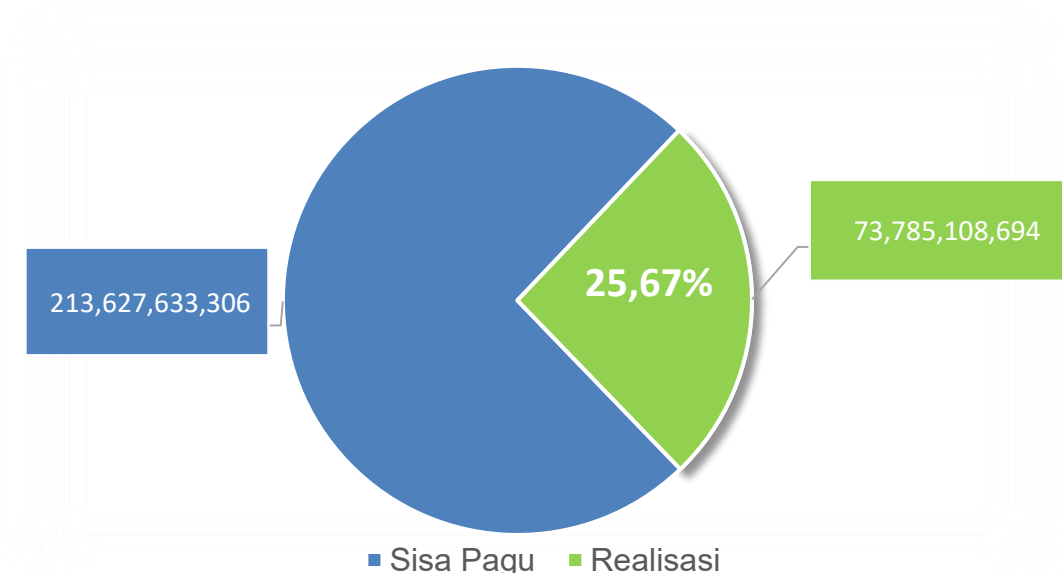
Tahun Anggaran 2026 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp287.412.742.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp 111.979.719.000;
- Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp175.433.023.000.

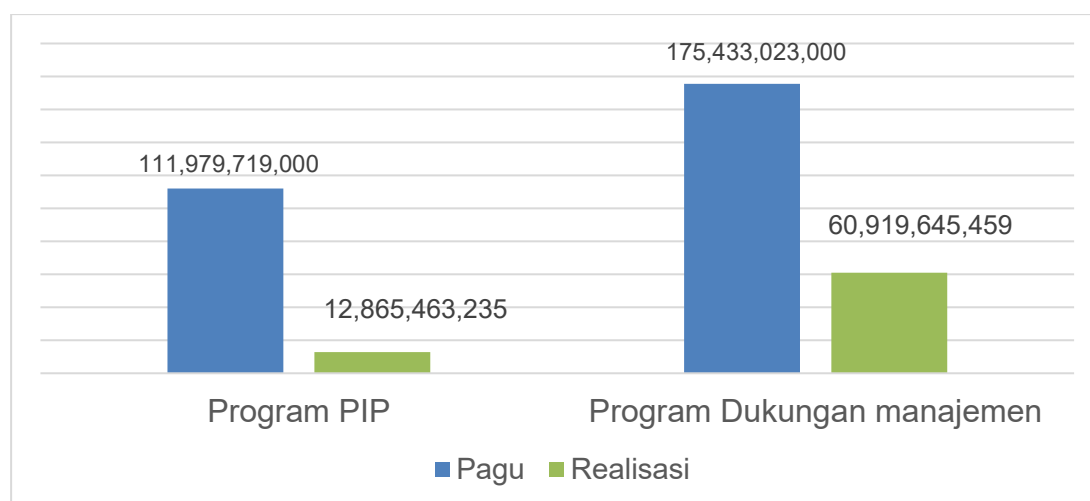
Realisasi Anggaran hingga 31 Maret 2026 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

Realisasi Anggaran Total: **Rp73.785.108.694,00** (Tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah.) atau sebesar 25,67% dari pagu.

Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total



Realisasi anggaran per program:



Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		175,433,023,000	60,919,645,459	34.73%	114,513,377,541
1	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	13,156,035,000	1,326,660,093	10.08%	11,829,374,907
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	155,649,796,000	57,358,117,898	36.85%	98,291,678,102
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	2,443,372,000	1,510,397,023	61.82%	932,974,977
4	Biro Hukum dan Organisasi	2,418,293,000	358,765,477	14.84%	2,059,527,523
5	Biro Pengawasan Internal	978,607,000	116,162,000	11.87%	862,445,000
6	Pusat Data dan Informasi	786,920,000	249,542,968	31.71%	537,377,032
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		44,517,548,000	5,170,998,807	11.62%	39,346,549,193
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerjasama	2,163,689,000	435,983,300	20.15%	1,727,705,700
2	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi	14,058,365,000	3,891,816,274	27.68%	10,166,548,726

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
3	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	28,295,494,000	843,199,233	2.98%	27,452,294,767
	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	19,352,440,000	374,816,627	1.94%	18,977,623,373
1	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	15,894,906,000	78,027,615	0.49%	15,816,878,385
2	Direktorat Advokasi	1,559,149,000	150,350,612	9.64%	1,408,798,388
3	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	1,898,385,000	146,438,400	7.71%	1,751,946,600
	Deputi Bidang Pengkajian Materi	9,465,148,000	1,409,197,251	14.89%	8,055,950,749
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,808,742,000	915,946,041	19.05%	3,892,795,959
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2,253,101,000	30,153,414	1.34%	2,222,947,586
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	2,403,305,000	463,097,796	19.27%	1,940,207,204
	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	32,556,806,000	4,981,417,953	15.30%	27,575,388,047
1	Direktorat Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	4,518,045,000	329,968,280	7.30%	4,188,076,720
2	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	23,544,953,000	2,627,085,903	11.16%	20,917,867,097
3	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	4,493,808,000	2,024,363,770	45.05%	2,469,444,230
	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	6,087,777,000	929,032,597	15.26%	5,158,744,403
1	Direktorat Pengendalian	1,543,761,000	239,811,671	15.53%	1,303,949,329
2	Direktorat Evaluasi	1,559,715,000	45,625,000	2.93%	1,514,090,000
3	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	2,984,301,000	643,595,926	21.57%	2,340,705,074
	TOTAL	287,412,742,000	73,785,108,694	25.67%	213,627,633,306

BAB IV | EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN

Bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi unit kerja dalam rangka mencapai Sasaran Program dan kegiatan. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya tindaklanjut. Usulan rekomendasi merupakan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di waktu mendatang. Kendala dan tindak lanjut atau rekomendasi atau usulan perbaikan dikelompokkan per Sasaran Program, yaitu:

1. Kendala dan Rekomendasi Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 1 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang Ditindaklanjuti	1. Belum terdapat petunjuk teknis/SOP yang jelas dalam pelaksanaan penyusunan Rekomendasi dan 2. Masih kekurangan SDM dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program dengan K/L, PEMDA, Orsospol dan Komponan masyarakat lainnya.	1. Menyusun Petunjuk teknis/SOP yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan penyusunan Rekomendasi dan 2. Memaksimalkan SDM yang tersedia.
Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	1. Materi sosialisasi masih bersifat umum dan belum sepenuhnya relevan dengan dinamika isu yang berkembang di masyarakat; 2. Belum adanya	1. Melakukan penyesuaian materi secara berkala agar lebih kontekstual, aktual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat; 2. Menyusun pedoman pelaksanaan sosialisasi

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	standardisasi metode dan format sosialisasi yang digunakan di berbagai daerah; dan 3. Distribusi informasi belum merata akibat perbedaan tingkat akses dan literasi masyarakat.	yang terstandar namun tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan kondisi daerah; dan 3. Mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi, baik digital maupun non-digital, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	Belum disusunnya pengukuran hasil pembudayaan Pancasila yang efektif	Menyusun pengukuran hasil pembudayaan Pancasila yang efektif
Persentase Implementasi Peta Jalan PIP	Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi antar K/L, PEMDA, Orsospol dan Komponen masyarakat lainnya	Memaksimalkan semua sarana baik di unit kerja dan mitra dalam meningkatkan komunikasi dengan K/L, PEMDA, Orsospol dan Komponen masyarakat lainnya
Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif	1. Belum adanya instrumen terkait jangkauan dari program PIP di radio dan rating program di televisi; 2. Inovasi dan pengembangan format konten masih terbatas, sehingga penyampaian pesan belum optimal menjangkau dan menarik <i>audiens</i> ; dan 3. Terbatasnya jumlah personel pendukung.	1. Menyusun sistem monitoring sederhana (<i>reach</i> , interaksi dan respon <i>audiens</i>) dan evaluasi rutin; 2. Melakukan pengembangan format konten yang lebih kreatif, variative dan adaptif menyesuaikan dengan target audiens; dan 3. Optimalisasi tim yang ada untuk kegiatan administrasi dan kegiatan teknis serta menambah personel pendukung sesuai kebutuhan.
Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti	Belum tersusunnya pedoman baku terkait mekanisme penyusunan, penyampaian, dan tindak lanjut rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi.	Melakukan penyusunan pedoman teknis dan penyampaian rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi pembinaan ideologi Pancasila.
Persentase Rekomendasi Hasil	Belum tersusunnya rencana kegiatan	Menyusun rencana kegiatan pembudayaan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti	pembudayaan Pancasila.	Pancasila.
Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila	Belum tersusunnya petunjuk pelaksanaan jaringan relawan yang mengaktualisasikan Pancasila.	Menyusun petunjuk pelaksanaan jaringan relawan yang mengaktualisasikan Pancasila.

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- Penyusunan Pedoman Optimalisasi dan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama PIP;
- Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung implementasi Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2026-2029;
- Pelaksanaan Optimalisasi Kerjasama PIP kepada mitra eksternal dan internal BPIP;
- Mengkoordinir pelaksanaan implementasi peta jalan PIP bersama dengan K/L dan Pemda;
- Dilakukan peninjauan/evaluasi terhadap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani yang sudah lewat masa berlakunya agar seluruh kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan optimal;
- Penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan prioritas kerja Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- Perlunya penguatan pada aspek jangkauan pelaksanaan, konsistensi kegiatan, serta kualitas substansi dan metode komunikasi pembinaan ideologi Pancasila;
- Diperlukan penataan yang lebih sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi, antara lain melalui penyusunan pedoman teknis sebagai acuan bersama agar kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan;
- Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi perlu terus dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik

sasaran, disertai penguatan konten yang lebih relevan dan mudah dipahami masyarakat;

- j) Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan capaian kinerja tidak hanya berfokus pada *output*, tetapi juga mampu menggambarkan efektivitas pelaksanaan serta dampaknya terhadap pemahaman masyarakat;
- k) Penyusunan instrument evaluasi program dan kegiatan yang terintegrasi dan komprehensif;
- l) Penyusunan dan pengajuan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program secara efektif dan efisien untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- m) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila melalui relawan gerakan kebajikan Pancasila bersama seluruh unit kerja di BPIP.

2. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 2 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Para mitra strategis belum memahami secara lengkap Indikator Nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan belum digunakannya secara maksimal hasil penyelarasan yang disampaikan.	Diperlukan penguatan bentuk hukum Indikator Nilai Pancasila dan sosialisasi/internalisasi yang lebih masif terhadap makna dan penggunaan Indikator Nilai Pancasila.
Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan	1. Belum semua instansi memahami urgensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan mereka; 2. Keterbatasan pemahaman teknis	1. Menyusun pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Badan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi ke instansi/Lembaga; dan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	dalam mengimplementasikan rekomendasi; dan 3. Minimnya regulasi operasional yang menjadi rujukan pelaksanaan advokasi	3. Menyusun materi advokasi yang lebih aplikatif dan kontekstual.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (Perban Nomor 5 Tahun 2020) sedang dievaluasi untuk menghasilkan 2 pedoman rekomendasi, yaitu rekomendasi analisis dan evaluasi serta rekomendasi pemberian hasil kajian kepada pimpinan.	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Hukum untuk merumuskan 2 pedoman rekomendasi, yaitu rekomendasi analisis dan evaluasi serta rekomendasi pemberian hasil kajian kepada pimpinan
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Terdapat kesulitan dalam menderivasi meta norma Pancasila yang terdapat dalam Indikator Nilai Pancasila kedalam setiap norma rancangan peraturan perundang-undangan yang diselaraskan.	Penyusunan penjelasan teknis masing-masing butir dalam Indikator Nilai Pancasila.
Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Koordinasi antar lembaga belum terbangun secara optimal; 2. Belum ada sistem pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi; dan 3. Rekomendasi belum sepenuhnya masuk ke agenda kerja lembaga sasaran.	1. Menjalin kerja sama melalui PKS dengan instansi terkait; 2. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator; dan 3. Menyesuaikan substansi rekomendasi dengan prioritas program lembaga sasaran.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (Perban Nomor 5 Tahun 2020) sedang dievaluasi untuk menghasilkan 2 pedoman rekomendasi, yaitu rekomendasi analisis dan evaluasi serta rekomendasi pemberian hasil kajian kepada pimpinan.	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Hukum untuk merumuskan 2 pedoman rekomendasi, yaitu rekomendasi analisis dan evaluasi serta rekomendasi pemberian hasil kajian kepada pimpinan

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- a) Untuk melaksanakan perpanjangan tugas Deputy bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagaimana diatur dalam organisasi dan tata kerja, perlu disusun arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam bentuk Peraturan BPIP;
- b) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas analisis dan penyelarasan di Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- c) Mendorong penyusunan pedoman pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila dalam bentuk Peraturan Badan, sebagai acuan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan advokasi di seluruh tingkatan dan sektor. Kedua rekomendasi ini diharapkan memperkuat tata kelola serta efektivitas pelaksanaan advokasi ideologi Pancasila secara nasional;
- d) Mendorong disusunnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mitra strategis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kajian dan advokasi pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan dan terarah; dan
- e) Mendorong tingkat Pimpinan dan melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal Menyusun format atau bentuk Surat Pengantar penyampaian Rekomendasi hasil Kajian Regulasi dan Kebijakan melalui tahap Deputy Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi ke Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan meminta arahan dan pertimbangan dari Ketua Dewan Pengarah BPIP.

3. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 3 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	Masih dilakukan penyusunan dokumen kajian sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.	Melakukan pelaporan progres penyusunan rekomendasi secara berkala kepada pimpinan.
Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga.	1. Melaksanakan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi sains dan Teknologi dan Kementerian/Lembaga terkait; dan 2. Melaksanakan kegiatan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.
Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	1. Pada Triwulan I, indikator belum dapat diukur karena rekomendasi kebijakan masih dalam tahap penyusunan; dan 2. Belum terbentuk komitmen tindak lanjut dari pemangku kepentingan karena <i>output</i> belum dihasilkan.	1. Mengembangkan Mendorong keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap awal kajian untuk memperkuat komitmen terhadap tindak lanjut hasil kajian; dan 2. Menyusun strategi diseminasi dan akseptasi sejak awal agar mempercepat tindak lanjut pada triwulan berikutnya.
Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	Proses penyusunan rekomendasi yang melibatkan lintas stakeholder sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang;	Peningkatan efektivitas komunikasi dengan stakeholder terkait;
Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi PIP yang ditindaklanjuti	Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga.	Melaksanakan kegiatan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Pada Triwulan I, kegiatan masih berada pada tahap awal (perencanaan, pengumpulan data, analisis awal), sehingga dokumen rekomendasi belum tersusun; dan 2. Kompleksitas isu lintas sektor memerlukan pendalaman analisis sebelum perumusan rekomendasi.	1. Mempercepat tahapan kajian melalui penguatan DKT, forum koordinasi, dan pengumpulan data lapangan; dan 2. Menerapkan pendekatan untuk mempercepat perumusan rekomendasi yang tajam dan aplikatif.

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program yaitu:

- a) Menyusun prioritas kegiatan didasarkan pada ketersediaan anggaran agar unit kerja tetap dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- b) Komitmen bersama antar unit kerja dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kegiatan;
- c) Melanjutkan proses finalisasi dan akseptasi dokumen rekomendasi kajian identifikasi nilai ideologi Pancasila agar dapat segera dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan dan penguatan materi pembinaan ideologi Pancasila;
- d) Memperkuat integrasi data sektoral dari kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk meningkatkan representativitas, validitas, dan aplikasi rekomendasi kebijakan secara nasional;
- e) Mengoptimalkan pendekatan sampling berbasis wilayah, tipologi kelembagaan, dan karakteristik satuan pendidikan untuk

- mendukung kajian yang representatif dan aplikatif, terutama pada satuan pendidikan swasta yang jumlahnya besar;
- f) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas unit kerja serta forum pemangku kepentingan untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi dapat diterapkan secara efektif;
 - g) Mengembangkan mekanisme *review* substansi dan *quality assurance* dalam penyusunan rekomendasi agar tetap berbasis evidensi, relevan, dan adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan kebijakan nasional;
 - h) Memperkuat keterlibatan stakeholder sejak tahap awal kajian melalui DKT, forum koordinasi, dan dialog kebijakan guna meningkatkan komitmen dan akseptasi terhadap hasil kajian serta mempercepat proses tindak lanjut rekomendasi;
 - i) Mengoptimalkan metode pengumpulan data secara *hybrid* (luring dan daring) untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan kualitas data kajian, khususnya pada lokus dengan karakteristik yang beragam;
 - j) Mengembangkan desain kajian berbasis pendekatan *policy-oriented research*, dengan penajaman isu prioritas dan penguatan analisis berbasis data untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan strategis;
 - k) Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait, guna memastikan keterpaduan data dan relevansi kebijakan yang dihasilkan; dan
 - l) Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi internal secara berkala, sebagai instrumen pengendalian kinerja untuk memastikan ketercapaian target penyelesaian kajian dan penyusunan rekomendasi pada triwulan berikutnya.

4. Kendala dan rencana tindak lanjut Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 4 Kendala dan Tindak Lanjut Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi	Banyak peserta yang belum mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi pengajar Diklat PIP.	Melakukan sosialisasi pendaftaran sertifikasi pengajar Diklat PIP melalui sistem aplikasi kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemda.
Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi	Belum maksimalnya Diklat PIP oleh Lembaga penyelenggara Diklat PIP.	Melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti hasil akreditasi penyelenggara Diklat PIP.
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik	Belum tersedianya peraturan terkait mekanisme secara teknis operasional dalam hal sinergi, kolaborasi dan gotong-royong pemanfaatan sumber daya nasional dalam penyelenggaraan Diklat PIP.	Melakukan komunikasi strategis dalam rangka pengembangan dan penerapan kebijakan/strategi untuk mewujudkan kesepakatan/peraturan terkait hubungan lembaga antara BPIP dengan K/L/instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah demi terselenggaranya Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional.
Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat	1. Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah; 2. Terbatasnya SDM dalam sekretariat tim asesor sertifikasi	1. Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dengan mengundang K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah; 2. Berkoordinasi dengan bagian Biro Umum dan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	pengajar Diklat PIP dalam melakukan verifikasi dan validasi berkas; 3. Durasi proses rekam jejak oleh Badan Intelijen Negara yang memerlukan waktu estimasi selama tiga bulan menjadi hambatan dalam akselerasi pemenuhan kebutuhan pengajar; 4. Belum adanya kekuatan hukum tetap pada hasil keputusan sertifikasi pengajar Diklat PIP mengakibatkan ketetapan tersebut masih bersifat <i>debatable</i> dan dapat diganggu gugat oleh peserta, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga serta menciptakan ketidakpastian administratif dalam penetapan kelulusan; 5. Mekanisme penandatanganan sertifikat pengajar Diklat PIP yang masih dilakukan secara manual oleh Kepala BPIP menimbulkan hambatan administratif berupa durasi waktu penyelesaian yang cukup lama, sehingga menghambat distribusi sertifikat dan legalitas kewenangan pengajar di lapangan; dan 6. Pemanfaatan pengajar Diklat PIP pasca-sertifikasi belum berjalan secara optimal akibat belum terintegrasinya sistem manajemen database pengajar, sehingga distribusi penugasan dan pemantauan kinerja pengajar belum dapat	SDM BPPI untuk pemenuhan kekurangan SDM tersebut; 3. Diperlukan penguatan koordinasi interlembaga untuk memastikan proses rekam jejak tetap berjalan sesuai prosedur tanpa menghambat proses berikutnya dalam sertifikasi pengajar Diklat PIP; 4. perlu dilakukan penguatan aspek legalitas melalui penyusunan regulasi atau pakta integritas yang menetapkan bahwa hasil penilaian tim asesor bersifat final dan mengikat (final and binding), serta didukung oleh transparansi rubrik penilaian dan berita acara yang akuntabel untuk memitigasi risiko gugatan di kemudian hari; 5. berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan transisi menuju implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang tersertifikasi guna memangkas birokrasi, mempercepat proses penerbitan sertifikat, dan menjamin validitas dokumen secara lebih aman dan akuntabel; dan 6. Sebagai langkah strategis, perlu dikembangkan platform manajemen pengajar terintegrasi yang mencakup repositori kompetensi dan rekam jejak penugasan guna memastikan pendayagunaan alumni sertifikasi dilakukan secara profesional, merata, dan berbasis

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	terpetakan secara sistematis dan maksimal.	pada kebutuhan.
Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	1. Pengembangan Sistem Aplikasi Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP mulai tahap registrasi hingga tahap penerbitan sertifikat; 2. Implementasi Diklat PIP oleh berbagai lembaga terakreditasi saat ini masih terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran dan belum optimalnya skema pembiayaan, sehingga pelaksanaan program secara masif dan berkesinambungan belum dapat terwujud sepenuhnya; 3. Penjaminan mutu Diklat PIP oleh lembaga terakreditasi diselenggarakan melalui standarisasi tata kelola dan audit kompetensi yang komprehensif guna memastikan seluruh proses instruksional berjalan selaras dengan parameter NSPK demi menghasilkan <i>output</i> pembelajaran yang kredibel dan berdampak luas; 4. Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah; dan 5. Belum tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi lembaga	1. Berkoordinasi dengan Pusat Data, Teknologi, dan Informasi BPIP untuk dapat memfasilitasi kebutuhan pengembangan sistem Aplikasi tersebut; 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP oleh Lembaga yang telah terakreditasi untuk melaksanakan Diklat PIP; 3. Berkoordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Diklat BPIP untuk setiap pelaksanaan Diklat PIP oleh Lembaga terakreditasi akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu terhadap Diklat PIP; 4. Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah; dan 5. Sebagai langkah strategis, perlu dilakukan advokasi kebijakan dan koordinasi lintas sektoral untuk mendorong perumusan regulasi mengenai skema pendanaan yang inovatif atau pengalokasian DAK spesifik guna memastikan keberlanjutan operasional serta pemerataan kualitas pelaksanaan Diklat PIP di seluruh lembaga terakreditasi.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	penyelenggara yang telah terakreditasi mengakibatkan keterbatasan ruang gerak finansial dalam mengimplementasikan Diklat PIP, sehingga standarisasi mutu yang telah ditetapkan sulit diwujudkan secara konsisten di tingkat daerah maupun instansi.	
Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	Penyelenggaraan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP belum secara optimal sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat PIP dan Keputusan Kepala BPIP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar dan Kurikulum Diklat PIP.	Melakukan koordinasi internal dan menyampaikan hasil evaluasi hasil Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP kepada Direktorat Penyelenggaraan Diklat.
Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Diklat bagi Purnapaskibraka bisa dilakukan setelah Hari Lahir Pancasila agar Paskibraka yang bertugas di tahun sebelumnya bisa disebut sebagai Purnapaskibraka.	Segara mengagendakan diklat PIP bagi Purnapaskibraka setelah Hari Lahir Pancasila.
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila	1. Belum adanya rumusan variabel dan indikator pada Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat PIP; 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP; dan 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana Diklat PIP mandiri.	1. Melakukan komunikasi strategis dalam rangka penyempurnaan Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila; 2. Melakukan pengembangan sistem manajemen terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa Learning Management System, yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik segmen peserta diklat; dan 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana Diklat yang

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		dimiliki K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana minimal penyelenggaraan Diklat PIP.

Penyelenggaraan Diklat PIP pada Triwulan I Tahun 2026 menghadapi kendala-kendala dari aspek dukungan regulasi/kebijakan, keterbatasan sumber daya, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 dengan melakukan komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPIP dalam rangka kolaborasi/gotong royong dalam:

- Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
- Pengembangan dan penerapan kebijakan strategis dan program teknis untuk mewujudkan gotong royong kolaboratif, integratif, dan sinergis dalam pemanfaatan sumber daya (SDM, finansial, sarana prasarana, data informasi) antara BPIP dengan lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional bagi aparatur negara, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;
- Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP dan pelaksanaan PIP dalam Diklat calon Paskibraka;
- Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
- Pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai standard dan kebutuhan;

- f) Pengembangan sistem dan metode pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- g) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP serta sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP untuk mendorong penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional di lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- h) Eskalasi pelaksanaan sertifikasi pengajar dan akreditasi penyelenggara Diklat PIP secara masif memerlukan penguatan payung hukum sekurang-kurangnya pada tingkat Peraturan Presiden guna memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal demi teralisasinya ekosistem pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi dan berkesinambungan;
- i) Penguatan Peran DPPI Pusat melalui rapat koordinasi nasional khusus DPPI dan pembangunan sistem monitoring berbasis aplikasi agar kinerja daerah dapat terpantau secara *real-time*;
- j) Percepatan Pembinaan Purnapaskibraka dengan segera menyusun agenda diklat PIP setelah Hari Lahir Pancasila untuk mendukung pencapaian target Duta Pancasila; dan
- k) Sinkronisasi Program dengan mengintegrasikan kegiatan pembentukan Paskibraka dan agenda pembinaan ideologi Pancasila agar capaian aktualisasi dan pelembagaan Pancasila berjalan beriringan.

5. Kendala dan rencana tindak lanjut Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 5 Kendala dan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Belum tersedianya dokumen atau payung hukum yang dapat dijadikan pedoman resmi dalam pelaksanaan pengendalian PIP; 2. Masih rendahnya pemahaman terhadap peran Direktorat Pengendalian dalam pelaksanaan program PIP di lingkungan internal BPIP maupun mitra eksternal; 3. Direktorat Pengendalian kerap kali belum dilibatkan secara optimal dalam tahap, pelaksanaan program; dan 4. Belum disahkannya metode pengendalian program PIP hal ini menyebabkan belum adanya kerangka teknis yang dapat dijadikan panduan dalam proses pengendalian. Akibatnya, pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan PIP berjalan tidak seragam dan kurang terdokumentasi secara konsisten.	1. Menyusun dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan BPIP atau pedoman teknis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian PIP; 2. Mensahkan metode pengendalian. Agar metode ini bisa diaplikasikan dan dapat diterapkan secara menyeluruh, meliputi prosedur pelaksanaan, instrumen pengendalian, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut; 3. Melakukan konsolidasi dalam rangka penyampaian informasi secara aktif kepada seluruh unit kerja internal maupun mitra eksternal terkait fungsi dan mandat Direktorat Pengendalian. Ini dilakukan melalui forum koordinasi; 4. Melakukan penguatan kapasitas tim pengendalian melalui pelatihan teknis, dan pendampingan agar mampu menjalankan peran pengendalian secara efektif dan adaptif; dan 5. Mendorong integrasi peran Direktorat Pengendalian dalam setiap tahapan pelaksanaan program PIP, agar pengendalian menjadi bagian integral dalam tata pelaksanaan program.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Membutuhkan koordinasi dan diskusi lebih lanjut untuk mengharmonisasikan draf pedoman pengendalian dan evaluasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja lainnya untuk dijadikan Peraturan Badan; 2. Membutuhkan pembuatan alat ukur evaluasi hasil pembudayaan nilai-nilai Pancasila; dan 3. Membutuhkan pembuatan alat ukur evaluasi hasil Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.	1. Dilaksanakannya koordinasi lintas direktorat dan biro untuk mengharmonisasikan substansi draf pedoman pengendalian dan evaluasi; 2. Dilaksanakannya analisis pendapat dari para ahli psikometri dan tim ahli substansi, dan unit kerja terkait untuk penyusunan dimensi dan indikator evaluasi hasil pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan evaluasi hasil Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; 3. Dilaksanakannya penyusunan butir butir instrumen evaluasi hasil pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan evaluasi hasil Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; 4. Dilaksanakannya pemuktahiran instrumen evaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PIP terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Buku pedoman pengukuran pelebagaan Pancasila sudah ditetapkan dan namun untuk Pengukuran IAP masih berproses; 2. Rekomendasi pengembangan metodologi tersebut masih perlu mendapatkan legitimasi dari pejabat yang berwenang agar dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengukuran tahun 2026; dan 3. BPIP belum optimal dalam menyediakan dan mendiseminasikan data	1. Melakukan koordinasi untuk melakukan penyusunan pengembangan metodologi pengukuran pelebagaan dan pengukuran IAP dengan BHO; dan 2. Perlunya pendistribusian data IAP secara terbuka, terstruktur, dan mudah diakses. Data tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan intervensi dalam menyusun kebijakan dan regulasi.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) kepada pemerintah daerah.	
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Belum tersedianya dokumen atau payung hukum sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP); 2. Ketiadaan landasan hukum formal menyebabkan belum adanya kepastian regulatif yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan fungsi pengendalian. Hal ini turut menghambat proses penyusunan rekomendasi yang berbasis kebijakan secara sistematis dan kredibel; 3. Belum tersusunnya metode pengendalian program PIP secara terstandarisasi. Ketiadaan metode yang baku menyebabkan belum adanya kerangka teknis yang dapat dijadikan panduan dalam proses pengendalian. Akibatnya, pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan PIP berjalan tidak seragam dan kurang terdokumentasi secara konsisten; dan 4. Fungsi Pengendalian	1. Menyusun dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan BPIP atau pedoman teknis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian PIP; 2. Merancang metode pengendalian yang bersifat aplikatif dan dapat diterapkan secara menyeluruh, meliputi prosedur pelaksanaan, instrumen pengendalian, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut; 3. Melakukan konsolidasi dalam rangka penyampaian informasi secara aktif kepada seluruh unit kerja internal maupun mitra eksternal terkait fungsi dan mandat Direktorat Pengendalian. Ini dilakukan melalui forum koordinasi; 4. Melakukan penguatan kapasitas tim pengendalian melalui pelatihan teknis, dan pendampingan agar mampu menjalankan peran pengendalian secara efektif dan adaptif; dan 5. Mendorong integrasi peran Direktorat Pengendalian dalam setiap tahapan pelaksanaan program PIP, agar pengendalian menjadi bagian integral dalam tata pelaksanaan program.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	belum dianggap hal yang sangat penting oleh penerima manfaat.	
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Membutuhkan koordinasi untuk mengharmonisasikan substansi draf pedoman pengendalian dan evaluasi yang sudah terselesaikan oleh Direktorat Evaluasi; 2. Membutuhkan sinkronisasi pendapat dari para ahli dengan kondisi empirik pelaksanaan Diklat di BPIP; dan 3. Keterbatasan data yang diberikan oleh unit kerja untuk penyusunan rekomendasi evaluasi internal BPIP.	1. Dilaksanakannya koordinasi lintas direktorat dan biro untuk membuat suatu pedoman yang menjadi dasar kegiatan pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila; 2. Dilaksanakannya analisis pendapat dari para ahli dengan kondisi empirik pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) di BPIP dalam menyusun rekomendasi hasil pelaksanaan Diklat PIP; dan 3. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
Persentase Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Pelaksanaan pengukuran masih dipengaruhi oleh dinamika organisasi serta keterbatasan ruang pengaturan, sehingga belum dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh; dan 2. Sehubungan dengan upaya efisiensi anggaran, terdapat rencana untuk melakukan penghematan lebih lanjut. Rencana efisiensi ini juga berpotensi berdampak pada pelaksanaan pengukuran, baik dari sisi cakupan kegiatan, waktu pelaksanaan, maupun sumber daya yang tersedia.	1. Penguatan legitimasi bisa dalam bentuk penyusunan peraturan sebagai landasan pengukuran; dan 2. Penyesuaian kegiatan Pengukuran Pelembagaan Pancasila agar sesuai anggaran yang tersedia.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Pengukuran Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Hasil capaian IAP yang masih bersifat tertutup Dengan capaian IAP bersifat tertutup, maka <i>output</i> rekomendasi pengukuran Aktualisasi Pancasila tidak dapat disampaikan ke pihak terkait.	Penguatan dasar hukum dalam bentuk penyusunan Surat Keputusan Kepala tentang Pedoman Pengukuran Aktualisasi Pancasila sebagai landasan pengukuran IAP.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila, baik dalam bentuk Peraturan BPIP maupun pedoman teknis internal;
- Memprioritaskan pengesahan metode pengendalian program PIP, agar pelaksanaan fungsi pengendalian dapat dilakukan secara terukur, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik;
- Mensosialisasikan kepada pihak internal dan eksternal untuk meningkatkan pemahaman terhadap posisi strategis Direktorat Pengendalian sebagai pengawal kesesuaian implementasi program PIP dengan kebijakan dan arah strategis BPIP;
- Memastikan integrasi fungsi pengendalian dalam seluruh siklus pelaksanaan program PIP;
- Penyelesaian Penyelesaian Pedoman Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan ditetapkan melalui regulasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Perlu pembentukan kelompok kerja evaluasi pelaksanaan PIP;
- Pembuatan Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Perlu dilakukan percepatan finalisasi dan penetapan metodologi pengukuran agar sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Penyempurnaan metodologi yang telah dihasilkan melalui evaluasi sebelumnya harus

diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang lebih operasional dan terstandar, sehingga implementasi di lapangan dapat berlangsung lebih konsisten dan akuntabel;

- i) Perlu dilakukan penguatan dasar hukum melalui penyusunan Surat Keputusan Kepala tentang Pedoman Pengukuran Aktualisasi Pancasila serta regulasi pendukung lainnya guna meningkatkan legitimasi dan keterbukaan hasil pengukuran. Selain itu, diperlukan penyesuaian desain dan pelaksanaan kegiatan pengukuran agar lebih adaptif terhadap dinamika organisasi dan keterbatasan anggaran, tanpa mengurangi kualitas dan cakupan substansi pengukuran. Optimalisasi perencanaan, prioritas kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya menjadi kunci agar pengukuran tetap berjalan efektif dan berkelanjutan;
- j) Proses pengajuan kebutuhan SDM yang telah berjalan harus segera ditindaklanjuti melalui percepatan pengisian peta jabatan yang telah diusulkan. Posisi-posisi strategis yang berkaitan langsung dengan pengukuran harus menjadi prioritas untuk diisi agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih optimal; dan
- k) BPIP belum optimal dalam menyediakan dan mendiseminasikan data hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. Padahal, pendistribusian data IAP secara terbuka, terstruktur, dan mudah diakses sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai landasan dalam melakukan intervensi kebijakan. Data hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) dapat menjadi rujukan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN, sekaligus mendukung penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD).

6. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Tabel 4. 6 Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Keterlambatan penyampaian dokumen usulan revisi anggaran dari unit kerja sehingga menghambat penerbitan dokumen revisi anggaran.	Perlu diadakan rapat bersama unit kerja tata cara revisi anggaran.
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu keuangan	laporan keuangan 2026 audited sedang dalam proses penyusunan, kemarin terhambat akibat maintenance aplikasi SAKTI.	Melakukan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Penyampaian Laporan dari unit kerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga memperhambat dalam penyusunan laporan kinerja.	Mengadakan rapat kepada unit kerja untuk menentukan penanggung jawab dalam penyusunan laporan kinerja.
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	- RUU BPIP belum dilakukan pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah; dan - Unit organisasi pemrakarsa tidak menyampaikan draf Rancangan Peraturan BPIP sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan BPIP Triwulan I Tahun 2026. Dari target sebanyak 6 Peraturan BPIP yang diundangkan hanya 1 Peraturan BPIP (16,6%).	- Menunggu Surat Presiden untuk penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU BPIP; dan - Meningkatkan intensitas koordinasi dan asistensi Biro Hukum dan Organisasi dan mendorong komitmen kepada unit organisasi pemrakarsa.
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	- Respon unit kerja terhadap Evaluasi Peta Proses Bisnis; dan - Perubahan Mekanisme dan Evaluasi Pelaksanaan RB.	- Melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Proses Bisnis; dan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian RB dengan pihak Internal BPIP dan Eksternal baik Instansi Pembina

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		maupun Instansi Meso.
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	1. Pemenuhan bukti dukung dalam proses penilaian masih belum maksimal khususnya mengenai implementasi aplikasi pengelolaan manajemen ASN baik pengelolaan manajemen talenta ataupun terkait kebijakan mengenai pengelolaan manajemen ASN di lingkungan BPIP; 2. Belum dipenuhinya secara maksimal mengenai kebutuhan kualitas ASN meliputi Pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai; dan 3. Salah satu indikator dalam indeks pengelolaan aset adalah mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk penghapusan yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak.	1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memenuhi Sistem Merit di BPIP; 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kebutuhan pengembangan kompetensi dan pemenuhan data dukung proses penilaian dan pemenuhan indeks profesionalisme ASN; dan 3. Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara yang telah dalam kondisi rusak berat untuk menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin.
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Kompetensi SDM Biro masih rendah.	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi atau Bimbingan Teknis.
Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik BPIP	Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang dimaksud .	Mengajukan permintaan SDM.
Nilai pengawasan kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal, masih banyak Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik, hal tersebut karena BPIP belum memiliki SDM Kearsipan yang fokus untuk melakukan Pengelolaan arsip, dan BPIP belum memiliki NSPK Kearsipan	Melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	yang menjadi syarat pelaksanaan kearsipan Internal.	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	1. Masih perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN serta memproses hasil inventarisasi peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya; 2. Masih terdapat proses penghapusan BMN belum tertib; 3. Terdapat Kesalahan Pembebanan Penggunaan Mata Anggaran Belanja; 4. Penatausahaan atas Persediaan Belum Tertib; 5. Penatausahaan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Tertib; dan 6. Belanja Barang dan Jasa pada Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Belum Sesuai Ketentuan.	1. Telah memberikan surat jawaban dari petugas pengelola BMN yang menyatakan kesediaan melaksanakan perintah Sestama untuk lebih tertib dalam proses penghapusan aset dan surat jawaban Kepala Subbag Manajemen BMN yang menyatakan kesediaan melaksanakan perintah Sestama untuk lebih tertib dalam proses penghapusan aset.
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan <i>cascading</i> kinerja sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat; 2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh unit kerja; 3. Memperbaharui kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan substansi terkait pembangunan budaya risiko, penetapan risk appetite, strategi <i>antifraud</i>; 4. pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko; 5. Melakukan identifikasi,	1. Pemenuhan Regulasi atas Manajemen Risiko; 2. Pemenuhan <i>Area of Improvement</i> atas Pelaksanaan Evaluasi pada tahun sebelumnya; 3. Penyediaan Jasa Konsultansi Pendampingan atas Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP kepada seluruh Unit Kerja; 4. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko <i>fraud</i> pada seluruh proses bisnis; 6. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko; 7. Menetapkan unit pengelola risiko yang bertugas melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya; 8. Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di unit kerja; 9. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon; dan 10. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.	Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP; 5. Penyediaan Jasa Konsultansi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi; dan 6. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	1. Keterbatasan SDM Teknis; 2. Teknologi yang terus berkembang dengan cepat; dan 3. Terjadi serangan ransomware pada 20 Juni 2026 pada Pusat Data Nasional yang mengakibatkan aplikasi BPIP tidak dapat diakses.	1. Perlu penambahan SDM Teknis; 2. Perlu melakukan pengembangan kompetensi SDM; dan 3. Melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan langkah dan tindakan kedepannya.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- a) Perlu adanya penguatan area perbaikan melalui koordinasi antar unit kerja dan/atau unit organisasi di lingkungan BPIP serta penguatan kompetensi APIP dalam rangka penilaian SPIP selaku tim penjamin kualitas;
- b) Pada tindak lanjut dari temuan BPK perlu adanya kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c) Perlu peningkatan koordinasi, komunikasi dan perhatian yang lebih dari para pengelola Keuangan (PPK) dalam penyediaan data Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa serta TP3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) sehingga data yang didapat menjadi representatif dalam menghasilkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh BPKP untuk pelaporannya kepada Presiden RI;
- d) Perlu adanya Pembuatan Timeline yang jelas mengenai pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas di BPIP sehingga sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditentukan oleh BPKP serta Pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara berkala oleh Biro Pengawasan Internal atas penyampaian data dukung SPIP Terintegrasi sehingga proses Penilaian Mandiri oleh Manajemen tidak mengalami kendala;
- e) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, perlunya untuk BPIP melakukan monitoring beserta evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kinerja sampai ke realisasi sehingga dapat memastikan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Target Kinerja mendukung Sasaran Strategis, Hal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan dokumentasi secara lebih tertib terhadap pelaksanaan monitoring tersebut;

- f) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala;
- g) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala;
- h) Pengelolaan arsip aktif pada beberapa Unit Kerja belum optimal, dan belum adanya NSPK Kearsipan sebagai syarat pelaksanaan kearsipan Internal. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diusulkan mencakup identifikasi unit dengan performa kearsipan rendah, implementasi NSPK Kearsipan, serta evaluasi dampak pelatihan dan implementasi NSPK terhadap kinerja pengelolaan arsip aktif. Langkah-langkah tindak lanjut diarahkan pada penetapan jadwal rutin untuk pengawasan internal dan eksternal, dukungan tim pengawasan dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta analisis mendalam terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi melibatkan pembentukan tim internal untuk memastikan pengawasan berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem manajemen mutu;
- i) Salah satu unsur penilaian Manajemen Risiko Indeks yakni adalah penguatan kompetensi penjaminan mutu dan kualitas

- pelaksanaan MRI melalui pelaksanaan sertifikasi pengelola risiko lingkup BPIP dengan kompetensi pelatihan serta bimbingan teknis Manajemen Risiko sektor Publik baik melalui penyelenggaraan BPKP maupun internal BPIP;
- j) Diperlukan Kerja Sama dan sinergi dari semua unit kerja dan pegawai untuk mendukung peningkatan indeks maturitas SPBE Triwulan I Tahun 2026. Dukungan dari pemangku kebijakan juga diperlukan untuk penguatan dari sisi regulasi dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data dan informasi di lingkungan BPIP;
 - k) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memenuhi Sistem Merit di BPIP;
 - l) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kebutuhan pengembangan kompetensi dan pemenuhan data dukung proses penilaian dan pemenuhan indeks profesionalisme ASN; dan
 - m) Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara yang telah dalam kondisi rusak berat untuk menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin.

BAB V | PENUTUP

Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat dimasa-masa mendatang. Gerak langkah Aktualisasi Pancasila harus dapat sampai pada masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Indikator kinerja BPIP harus dapat diukur agar Akuntabilitas Kinerja terjaga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang makin bijaksana dan mengedepankan asas kepatutan.

SALAM PANCASILA!

Jakarta, 24 April 2026

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI



BPIP 2026



bpip.go.id



persuratan@bpip.go.id



[@bpipri](https://www.instagram.com/bpipri)



Jl. Veteran III No. 2,
Jakarta Pusat 10110